

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Menurut Teori Evaluasi Daniel L. Stufflebeam, Menggunakan model CIPP :

Untuk Pejabat Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Kabupaten Bojonegoro (Perencana Kebijakan)

A. Context (Konteks)

Tujuan: Menggali latar belakang, dasar hukum, dan relevansi kebijakan penyelenggaraan kepemudaan dalam pengembangan kewirausahaan.

1. Bagaimana latar belakang munculnya kebijakan penyelenggaraan kepemudaan dalam rangka pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Bojonegoro?
2. Apa tujuan utama kebijakan ini sebagaimana tercantum dalam Perda No. 1 Tahun 2019?
3. Bagaimana kondisi dan potensi kepemudaan di Bojonegoro sebelum kebijakan ini diterapkan?
4. Apa saja masalah utama yang ingin diatasi melalui kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda ini?
5. Bagaimana relevansi kebijakan ini terhadap kebutuhan daerah dan arah pembangunan ekonomi Kabupaten Bojonegoro?

B. Input (Masukan)

Tujuan: Menilai sumber daya, perencanaan, dan strategi yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan.

1. Apa saja sumber daya (manusia, anggaran, fasilitas) yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan kepemudaan ini?
2. Bagaimana proses perencanaan program kewirausahaan pemuda dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja?
3. Apakah terdapat kerja sama dengan instansi lain (pemerintah, swasta, atau lembaga pendidikan) dalam pelaksanaan program?
4. Bagaimana kriteria pemilihan peserta atau penerima manfaat dari program pengembangan kewirausahaan pemuda ini?
5. Apakah sumber pendanaan program ini berasal dari APBD saja atau juga dari sumber lain?

C. Process (Proses)

Tujuan: Menilai pelaksanaan kebijakan, mekanisme kegiatan, serta hambatan yang dihadapi.

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan bagi pemuda dilakukan di lapangan?
2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam implementasi program dan bagaimana koordinasi antar lembaga dilakukan?
3. Apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan rencana yang tertuang dalam dokumen kebijakan?
4. Kendala apa saja yang dihadapi selama pelaksanaan program di lapangan?
5. Bagaimana langkah Dinas dalam mengatasi hambatan atau kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut?

D. Product (Produk/Hasil)

Tujuan: Mengidentifikasi hasil, dampak, dan keberlanjutan program kebijakan.

1. Apa hasil nyata yang telah dicapai dari kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda di Bojonegoro sejauh ini?
2. Apakah terdapat peningkatan jumlah wirausaha muda setelah program ini berjalan?
3. Bagaimana respon atau tingkat partisipasi pemuda terhadap program yang dilaksanakan?
4. Apakah ada evaluasi berkala untuk menilai efektivitas dan keberlanjutan program?
5. Menurut Bapak/Ibu, apa rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan agar program ini lebih optimal di masa mendatang?

Untuk Perwakilan dari pengelola program/ pelatihan

A. Context (Konteks)

Tujuan: Mengetahui latar belakang, relevansi, dan kebutuhan terhadap kebijakan serta pelatihan yang dijalankan.

1. Bagaimana pandangan lembaga Anda terhadap kebijakan penyelenggaraan kepemudaan yang diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2019?
2. Apa latar belakang lembaga Anda terlibat dalam kegiatan atau program pengembangan kewirausahaan pemuda di Kabupaten Bojonegoro?
3. Bagaimana kondisi dan potensi pemuda Bojonegoro yang mendorong perlunya pelatihan kewirausahaan?
4. Menurut lembaga Anda, sejauh mana kebijakan pemerintah daerah sudah sesuai dengan kebutuhan pemuda di bidang kewirausahaan?
5. Apa harapan lembaga Anda terhadap kebijakan kepemudaan ini dalam mendukung pengembangan wirausaha muda di Bojonegoro?

B. Input (Masukan)

Tujuan: Mengidentifikasi sumber daya, perencanaan, dan dukungan yang dimiliki lembaga dalam menjalankan pelatihan.

1. Sumber daya apa saja (instruktur, kurikulum, sarana) yang disiapkan lembaga dalam pelatihan kewirausahaan pemuda?
2. Bagaimana proses perencanaan kegiatan pelatihan dilakukan? Apakah melibatkan koordinasi dengan dinas terkait?
3. Dari mana sumber pendanaan kegiatan pelatihan berasal (APBD, bantuan pemerintah, swasta, atau mandiri)?
4. Bagaimana lembaga menentukan peserta yang berhak mengikuti pelatihan kewirausahaan?
5. Apakah lembaga memiliki standar atau indikator keberhasilan dalam pelaksanaan pelatihan kepemudaan?

C. Process (Proses)

Tujuan: Menggali pelaksanaan kegiatan pelatihan, metode, dan hambatan yang dihadapi.

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pelatihan kewirausahaan dilakukan (tahapan, durasi, bentuk kegiatan)?
2. Metode pelatihan apa yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan wirausaha pemuda?
3. Bagaimana bentuk kerja sama antara lembaga Anda dengan pemerintah daerah selama proses pelatihan berlangsung?
4. Apa kendala utama yang dihadapi lembaga dalam melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda?
5. Bagaimana lembaga melakukan monitoring atau evaluasi selama pelaksanaan pelatihan?

D. Product (Produk/Hasil)

Tujuan: Menilai hasil, manfaat, dan dampak pelatihan bagi peserta serta keberlanjutannya.

1. Apa hasil yang telah dicapai dari kegiatan pelatihan kewirausahaan yang dilakukan lembaga Anda?
2. Apakah peserta pelatihan menunjukkan peningkatan kemampuan atau telah memulai usaha setelah mengikuti program?
3. Bagaimana respon dan tingkat partisipasi pemuda terhadap kegiatan pelatihan yang dilakukan?
4. Apakah ada tindak lanjut atau pendampingan bagi peserta setelah pelatihan selesai?
5. Menurut lembaga Anda, apa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelatihan kewirausahaan bagi pemuda di masa mendatang?

Untuk Pemuda yang mengikuti program terkait (Sasaran program)

A. Aspek Konteks (Context)

Tujuan : Kebutuhan, relevansi, dan latar belakang program bagi pemuda.

1. Bagaimana pendapat Anda tentang kondisi dan kebutuhan pemuda di Kabupaten Bojonegoro sebelum adanya program pengembangan kewirausahaan ini?
2. Apakah menurut Anda program kewirausahaan ini sesuai dengan kebutuhan dan potensi pemuda di daerah Anda?
3. Bagaimana Anda mengetahui adanya program ini, dan apa alasan Anda tertarik untuk mengikutinya?
4. Menurut Anda, sejauh mana kebijakan penyelenggaraan kepemudaan di Bojonegoro mendukung aspirasi dan minat wirausaha pemuda?
5. Apakah program ini menjawab tantangan utama yang dihadapi pemuda, seperti pengangguran atau kurangnya lapangan kerja?

B. Aspek Masukan (Input)

Tujuan : Sumber daya, kesiapan peserta, serta dukungan sarana dan tenaga pelaksana.

1. Bagaimana menurut Anda proses seleksi atau perekrutan peserta program ini apakah sudah terbuka dan adil?
2. Bagaimana kualitas dan kesiapan narasumber/pelatih yang memberikan pelatihan kewirausahaan kepada peserta?
3. Apakah fasilitas, sarana, dan bahan pelatihan yang disediakan sudah memadai untuk mendukung kegiatan belajar dan praktik?
4. Menurut Anda, apakah dukungan dari pemerintah daerah, lembaga kepemudaan, atau pihak lain sudah cukup dalam mendukung pelaksanaan program ini?
5. Sejauh mana latar belakang Anda (pendidikan, pengalaman, motivasi) membantu Anda dalam mengikuti program ini?

C. Aspek Proses (Process)

Tujuan : Pelaksanaan kegiatan, metode, dan partisipasi peserta dalam program.

1. Bagaimana proses pelatihan atau pembinaan kewirausahaan dilaksanakan? Apakah berjalan sesuai jadwal dan materi yang dijanjikan?
2. Apakah metode pelatihan yang digunakan (teori, praktik, pendampingan) efektif bagi Anda?
3. Bagaimana interaksi antara peserta, pelatih, dan penyelenggara selama kegiatan berlangsung?
4. Apakah Anda menghadapi kendala selama mengikuti program (misalnya waktu, fasilitas, komunikasi, atau materi)?

5. Bagaimana tingkat partisipasi Anda dan peserta lain dalam setiap kegiatan program?

D. Aspek Produk (Product)

Tujuan : Hasil, manfaat, dan dampak program bagi peserta.

1. Apa hasil konkret yang Anda peroleh setelah mengikuti program ini (pengetahuan, keterampilan, jaringan, atau usaha yang dijalankan)?
2. Apakah program ini membantu Anda dalam memulai atau mengembangkan usaha sendiri?
3. Menurut Anda, apakah perubahan positif terjadi pada diri Anda setelah mengikuti program (motivasi, kemandirian, atau kemampuan berwirausaha)?
4. Apakah manfaat program ini juga dirasakan oleh masyarakat sekitar atau lingkungan Anda?
5. Apa saran Anda agar program ini lebih bermanfaat dan berkelanjutan bagi pemuda di Bojonegoro?

Untuk masyarakat sekitar

A. Aspek Konteks (Context)

Tujuan : Relevansi dan kebutuhan program kepemudaan di lingkungan masyarakat.

1. Bagaimana pandangan Anda terhadap kondisi dan peran pemuda di lingkungan ini sebelum adanya program pengembangan kewirausahaan?
2. Apakah menurut Anda program kepemudaan ini penting untuk dilaksanakan di wilayah Bojonegoro, khususnya dalam bidang kewirausahaan?
3. Seberapa besar kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi pemuda?
4. Apakah masyarakat mengetahui tujuan dan manfaat dari program kewirausahaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ini?
5. Menurut Anda, apakah program ini sesuai dengan potensi dan permasalahan pemuda di daerah Anda?

B. Aspek Masukan (Input)

Tujuan : Sumber daya, dukungan, dan kesiapan pelaksanaan program.

1. Bagaimana pendapat Anda mengenai dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan kepemudaan dan kewirausahaan di wilayah Anda?
2. Apakah sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan program terlihat memadai dan layak?
3. Bagaimana menurut Anda tentang kualitas pembina, pelatih, atau penyelenggara yang terlibat dalam kegiatan tersebut?

4. Apakah masyarakat turut dilibatkan atau diberi informasi mengenai pelaksanaan program ini?
5. Sejauh mana peran lembaga atau organisasi masyarakat dalam mendukung kegiatan kepemudaan ini?

C. Aspek Proses (Process)

Tujuan : Pelaksanaan program, partisipasi, dan interaksi antara pihak penyelenggara, pemuda, dan masyarakat.

1. Bagaimana Anda melihat pelaksanaan kegiatan program kewirausahaan di lingkungan Anda apakah berjalan lancar dan terorganisir?
2. Apakah masyarakat di sekitar turut mendukung atau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut (misalnya menyediakan tempat, dukungan moral, atau kerja sama)?
3. Bagaimana komunikasi antara panitia pelaksana, peserta program, dan masyarakat selama kegiatan berlangsung?
4. Apakah pelaksanaan program ini mengganggu aktivitas masyarakat sekitar atau justru memberikan manfaat langsung?
5. Menurut Anda, apakah pelaksanaan program sudah berjalan transparan dan melibatkan unsur masyarakat secara terbuka?

D. Aspek Produk (Product)

Tujuan : Hasil, manfaat, dan dampak program terhadap lingkungan masyarakat.

1. Apakah Anda melihat adanya perubahan pada pemuda di lingkungan ini setelah mengikuti program kewirausahaan tersebut (misalnya lebih produktif, mandiri, atau kreatif)?
2. Apakah program ini memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, misalnya peningkatan ekonomi lokal atau munculnya usaha baru?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap hasil kegiatan ini apakah dianggap bermanfaat atau belum terasa dampaknya?
4. Apakah ada bentuk tindak lanjut dari peserta program yang memberi kontribusi nyata bagi lingkungan (misalnya membuka usaha, menciptakan lapangan kerja, atau kegiatan sosial)?
5. Apa saran Anda agar program pengembangan kewirausahaan bagi pemuda di Bojonegoro dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat?

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Informan : Pejabat Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro

Tanggal Wawancara : 28 November 2025

A. Context (Konteks)
1. Bagaimana latar belakang munculnya kebijakan penyelenggaraan kepemudaan dalam rangka pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Bojonegoro?
Latar belakang munculnya kebijakan ini sebenarnya berangkat dari kondisi kepemudaan Bojonegoro beberapa tahun lalu. Kita melihat banyak pemuda yang memiliki potensi besar, tetapi belum mendapatkan ruang dan pembinaan yang memadai. Angka pengangguran usia produktif relatif tinggi, sementara kebutuhan dunia kerja dan peluang usaha sudah mulai berubah. Melihat kondisi itu, pemerintah daerah merasa perlu menyusun kebijakan yang lebih terpadu untuk mendorong pemberdayaan pemuda, terutama melalui jalur kewirausahaan. Perda No. 1 Tahun 2019 kemudian hadir sebagai dasar hukum agar pembinaan pemuda dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan.
2. Apa tujuan utama kebijakan ini sebagaimana tercantum dalam Perda No. 1 Tahun 2019?
Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan pemuda Bojonegoro yang berkarakter, mandiri, inovatif, dan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Melalui Perda ini, pemuda didorong agar memiliki daya saing, termasuk dalam sektor ekonomi produktif. Pemerintah ingin menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan kreativitas, inklusivitas, dan kemandirian, terutama melalui pengembangan kewirausahaan. Harapannya, pemuda tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja.
3. Bagaimana kondisi dan potensi kepemudaan di Bojonegoro sebelum kebijakan ini diterapkan?
Sebelum kebijakan ini diterapkan, kita mendapati bahwa kapasitas pemuda di Bojonegoro belum sepenuhnya tergarap. Banyak pemuda sebenarnya kreatif dan aktif, tetapi tidak memiliki keterampilan teknis maupun manajerial yang cukup untuk masuk dunia usaha. Akses terhadap pelatihan, pendampingan, dan permodalan pun masih terbatas. Namun di sisi lain, ada modal sosial yang kuat, mulai dari komunitas pemuda, organisasi, hingga kegiatan berbasis desa. Potensi itu yang kemudian ingin kita dorong melalui kebijakan ini agar lebih terstruktur dan memiliki dampak nyata.
4. Apa saja masalah utama yang ingin diatasi melalui kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda ini?

Masalah yang ingin kami atasi ada beberapa. Pertama, tingginya angka pengangguran pemuda karena minimnya keterampilan dan pengalaman kerja. Kedua, masih kurangnya fasilitas pelatihan dan pembinaan kewirausahaan yang terintegrasi. Ketiga, terbatasnya kesempatan pemuda untuk mendapatkan akses permodalan atau membuka usaha mandiri. Keempat, belum adanya ekosistem kewirausahaan yang kuat, baik dari sisi regulasi, pembinaan, maupun keterlibatan dunia usaha. Melalui kebijakan ini, kami berusaha menjawab persoalan tersebut secara bertahap dan komprehensif.
5. Bagaimana relevansi kebijakan ini terhadap kebutuhan daerah dan arah pembangunan ekonomi Kabupaten Bojonegoro?
Kebijakan ini sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan Bojonegoro. Saat ini daerah sedang mendorong transformasi ekonomi, tidak hanya bergantung pada sektor-sektor tradisional seperti pertanian atau migas. Kita ingin memperkuat UMKM, industri kreatif, dan wirausaha baru. Pemuda adalah kunci untuk mendukung arah pembangunan tersebut. Dengan membekali mereka keterampilan dan membuka peluang usaha, kita berharap lahir generasi muda yang mampu menciptakan nilai ekonomi baru, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, kebijakan ini bukan hanya pembinaan pemuda, tetapi juga strategi pembangunan ekonomi jangka panjang.
B. Input (Masukan)
1. Apa saja sumber daya (manusia, anggaran, fasilitas) yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan kepemudaan ini?
Dalam pelaksanaan program kepemudaan, terutama yang berfokus pada pengembangan kewirausahaan, kami menyiapkan beberapa jenis sumber daya. Dari sisi sumber daya manusia, program ini melibatkan pejabat struktural, staf teknis, serta tenaga pelatih atau instruktur yang memiliki kompetensi di bidang wirausaha. Kami juga bekerja sama dengan fasilitator profesional untuk materi tertentu. Dari sisi anggaran, sebagian besar kegiatan didukung oleh APBD Kabupaten Bojonegoro melalui alokasi di bidang ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi. Sedangkan untuk fasilitas, kami memanfaatkan balai latihan kerja, ruang pelatihan, peralatan praktik usaha, serta sarana pendukung lain agar peserta dapat mengikuti kegiatan secara optimal.
2. Bagaimana proses perencanaan program kewirausahaan pemuda dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja?
Proses perencanaan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, kami melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan dengan melihat data pengangguran pemuda,

potensi lokal, serta masukan dari kecamatan dan desa. Setelah itu, kami melakukan koordinasi lintas bidang untuk menentukan jenis pelatihan yang paling relevan. Selanjutnya, penyusunan program dilakukan pada saat forum perencanaan seperti Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah. Pada tahap inilah kami menyesuaikan kebutuhan lapangan dengan kemampuan anggaran daerah. Setelah perencanaan matang, barulah disusun jadwal, kurikulum pelatihan, dan mekanisme rekrutmen peserta.
3. Apakah terdapat kerja sama dengan instansi lain (pemerintah, swasta, atau lembaga pendidikan) dalam pelaksanaan program?
Ya, tentu ada. Program kewirausahaan ini tidak bisa berjalan sendiri, sehingga kami membangun kemitraan dengan beberapa pihak. Dari sektor pemerintah, kami berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi dan UMKM, serta pemerintah desa. Dari sektor swasta, kami menggandeng perusahaan melalui program CSR untuk pendampingan, magang, maupun fasilitasi pemasaran. Kami juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan, seperti perguruan tinggi dan lembaga pelatihan swasta, untuk penyediaan instruktur dan pengembangan modul pelatihan. Kolaborasi seperti ini menjadi kunci agar program berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
4. Bagaimana kriteria pemilihan peserta atau penerima manfaat dari program pengembangan kewirausahaan pemuda ini?
Kriteria peserta umumnya meliputi beberapa aspek. Pertama, peserta harus merupakan pemuda berusia produktif sesuai kategori yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, memiliki minat dan motivasi kuat dalam bidang kewirausahaan. Ketiga, berdomisili di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Kami juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi, sehingga pemuda yang membutuhkan atau belum memiliki pekerjaan kita prioritaskan. Proses seleksi dilakukan secara terbuka melalui pendaftaran, verifikasi administrasi, dan kadang wawancara singkat untuk memastikan peserta benar-benar siap mengikuti pelatihan.
5. Apakah sumber pendanaan program ini berasal dari APBD saja atau juga dari sumber lain?
Pendanaan utama memang berasal dari APBD Kabupaten Bojonegoro. Namun, tidak hanya itu. Dalam beberapa kegiatan, kami juga mendapatkan dukungan dari CSR perusahaan yang beroperasi di Bojonegoro. Selain itu, ada program yang didukung oleh bantuan dari kementerian terkait, terutama untuk kegiatan peningkatan keterampilan vokasional dan wirausaha baru. Kolaborasi pendanaan

seperti ini sangat membantu agar program bisa menjangkau lebih banyak pemuda.
C. Process (Proses)
1. Bagaimana tahapan pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan bagi pemuda dilakukan di lapangan?
Secara umum, tahapan pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda kami lakukan melalui beberapa langkah. Pertama, kami melakukan pendataan kebutuhan pelatihan berdasarkan usulan desa, kecamatan, dan hasil kajian internal dinas. Kedua, kami membuka pendaftaran peserta, baik secara online maupun melalui pemerintah desa. Ketiga, kami menyusun jadwal pelatihan, menentukan instruktur, serta menyiapkan sarana prasarana. Setelah pelaksanaan pelatihan dimulai, peserta mengikuti materi teori dan praktik, tergantung jenis kewirausahaannya.
2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam implementasi program dan bagaimana koordinasi antar lembaga dilakukan?
Pihak yang terlibat cukup banyak. Dari pemerintah daerah, ada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta pemerintah desa yang membantu penyebaran informasi. Kami juga bekerja sama dengan Lembaga pelatihan kerja (LPK), kadang pihak swasta atau UMKM lokal yang bersedia menjadi mentor. Koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi sebelum pelatihan, penyusunan jadwal bersama, serta pelaporan secara berkala. Setiap pihak memiliki tugas yang jelas, sehingga mekanisme koordinasi bisa berjalan lebih terarah
3. Apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan rencana yang tertuang dalam dokumen kebijakan?
Secara garis besar, pelaksanaan program sudah sesuai dengan rencana yang tercantum dalam Perda No. 1 Tahun 2019 dan dokumen teknis lainnya. Mulai dari sasaran pemuda, bentuk kegiatan, sampai tujuan peningkatan kemandirian ekonomi, semuanya sudah kami jalankan sesuai pedoman. Namun tentu ada beberapa penyesuaian di lapangan, seperti menyesuaikan jumlah peserta, jenis pelatihan yang paling dibutuhkan, dan ketersediaan sarana.
4. Kendala apa saja yang dihadapi selama pelaksanaan program di lapangan?
Kendala yang kami hadapi cukup beragam. Pertama, minat dan komitmen peserta kadang belum stabil ada yang semangat di awal namun kurang konsisten mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Kedua, keterbatasan sarana dan peralatan, terutama untuk pelatihan yang membutuhkan mesin atau alat khusus. Ketiga, koordinasi jadwal dengan instruktur, karena beberapa instruktur memiliki agenda yang padat. Di sisi lain, masih ada kendala eksternal seperti akses lokasi pelatihan untuk desa yang jauh dan keterbatasan waktu peserta yang sudah bekerja.

5. Bagaimana langkah Dinas dalam mengatasi hambatan atau kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut?
Untuk mengatasi hambatan tersebut, kami melakukan beberapa langkah. Pertama, kami semakin memperkuat pendataan peserta agar yang mendaftar benar-benar pemuda yang berminat tinggi. Kedua, kami melakukan pengadaan bertahap untuk peralatan pelatihan yang kurang, serta menggandeng UMKM lokal untuk meminjam atau menyediakan fasilitas tambahan.
D. Product (Produk/ Hasil)
1. Apa hasil nyata yang telah dicapai dari kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda di Bojonegoro sejauh ini?
Kalau kita melihat capaian sampai saat ini, program pengembangan kewirausahaan pemuda sudah menghasilkan beberapa output yang cukup konkret. Misalnya, telah terbentuk beberapa kelompok usaha pemuda baru di beberapa kecamatan, kemudian banyak peserta yang berhasil mengembangkan usaha mandiri setelah mengikuti pelatihan. Selain itu, peningkatan kapasitas pemuda dalam hal keterampilan usaha mulai dari manajemen, pemasaran digital, hingga pengelolaan keuangan juga menjadi hasil nyata yang kami lihat berkembang cukup baik.
2. Apakah terdapat peningkatan jumlah wirau saha muda setelah program ini berjalan?
Ya, ada peningkatan. Memang tidak signifikan secara drastis, tetapi tren kenaikannya terlihat positif setiap tahun. Dari data terakhir, jumlah pemuda yang mulai mendirikan usaha atau mengembangkan usaha rumahan meningkat, terutama di sektor kuliner, kriya, dan layanan digital. Banyak di antara mereka yang sebelumnya belum punya usaha, tetapi setelah mengikuti pelatihan, mereka mulai berani memulai bisnis kecil.
3. Bagaimana respon atau tingkat partisipasi pe muda terhadap program yang dilaksanakan?
Respons pemuda bisa dikatakan cukup antusias, terutama ketika program disampaikan dengan pendekatan yang sesuai minat mereka—misalnya pelatihan digital marketing atau kewirausahaan berbasis teknologi. Namun memang, tingkat partisipasi masih beragam. Pemuda di wilayah perkotaan cenderung lebih aktif, sedangkan pemuda di wilayah kecamatan yang jauh dari pusat kota masih membutuhkan dorongan lebih, baik dari pemerintah desa maupun organisasi kepemudaan.
4. Apakah ada evalu asi berkala untu k menilai e fektivitas dan keberlanjutan program?
Ya, kami melakukan evaluasi secara rutin setiap akhir kegiatan, baik melalui

monitoring lapangan, kuesioner peserta, maupun laporan tertulis dari penyelenggara. Evaluasi ini penting untuk melihat apakah materi pelatihan sesuai kebutuhan pemuda, bagaimana pelaksanaan teknisnya, serta apakah ada dampak lanjutan setelah pendampingan. Ke depan, kami juga sedang memperkuat mekanisme evaluasi berbasis data agar keberlanjutan program bisa lebih terukur.

5. Menurut Bapak/Ibu, apa rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan agar program ini lebih optimal di masa mendatang?

Kalau dari kami, ada beberapa rekomendasi. Pertama, perlu diperluas jangkauan program terutama di wilayah desa agar pemuda di daerah pinggiran juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Kedua, pendampingan pasca pelatihan harus diperkuat, karena banyak pemuda yang sudah punya ide usaha tapi masih bingung dalam eksekusi. Ketiga, perlu adanya kolaborasi lebih erat dengan dunia usaha dan UMKM agar pemuda bisa langsung praktik dan mendapatkan jaringan pasar. Dan terakhir, penguatan permodalan atau akses pembiayaan juga penting supaya usaha yang sudah dirintis bisa berkembang lebih cepat.

Informan : Pengelola Program/ Pelatihan

Tanggal : 29 November 2025

A. Context (Konteks)
1. Bagaimana pandangan lembaga Anda terhadap kebijakan penyelenggaraan kepemudaan yang diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2019?
Dari sudut pandang lembaga kami, Perda No. 1 Tahun 2019 merupakan regulasi yang sangat strategis dan progresif. Perda ini memberi kerangka kerja yang jelas bagi penguatan potensi pemuda di Bojonegoro, termasuk di bidang kewirausahaan. Kami melihat kebijakan ini sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengembangan kapasitas pemuda secara sistematis. Adanya payung hukum yang kuat juga memudahkan lembaga seperti kami untuk bekerja sama, karena arah dan tujuan program menjadi lebih terarah dan terukur
2. Apa latar belakang lembaga Anda terlibat dalam kegiatan atau program pengembangan kewirausahaan pemuda di Kabupaten Bojonegoro?
Keterlibatan lembaga kami berawal dari adanya kebutuhan peningkatan kapasitas pemuda yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Lembaga kami memang fokus pada pelatihan keterampilan, manajemen bisnis, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketika melihat bahwa pemuda Bojonegoro memiliki potensi besar tetapi belum sepenuhnya tergarap, kami merasa ini adalah kesempatan untuk memberikan kontribusi. Selain itu, pemerintah daerah sangat terbuka dalam menjalin kemitraan, sehingga kami dapat menyesuaikan modul dan metode pelatihan sesuai kebutuhan lokal.
3. Bagaimana kondisi dan potensi pemuda Bojonegoro yang mendorong perlunya pelatihan kewirausahaan?
Pemuda di Bojonegoro memiliki energi, kreativitas, dan semangat yang cukup tinggi, tetapi banyak dari mereka yang belum memiliki keterampilan teknis maupun pengetahuan dasar tentang usaha. Banyak yang ingin berwirausaha tetapi tidak tahu cara memulai, mengelola keuangan, atau memasarkan produk. Di beberapa wilayah, lapangan kerja formal juga terbatas sehingga wirausaha dapat menjadi alternatif. Selain itu, sektor-sektor unggulan di Bojonegoro seperti pertanian, kuliner, kerajinan, dan industri kreatif sangat potensial dikembangkan oleh pemuda. Kondisi inilah yang mendorong perlunya pelatihan kewirausahaan agar potensi tersebut bisa berkembang secara optimal.
4. Menurut lembaga Anda, sejauh mana kebijakan pemerintah daerah sudah sesuai dengan kebutuhan pemuda di bidang kewirausahaan?
Secara umum kebijakan pemerintah daerah sudah sangat relevan dengan kebutuhan

pemuda. Pemerintah telah menyediakan ruang pembinaan, fasilitas pelatihan, dan pendampingan yang menjadi kebutuhan dasar bagi calon wirausahawan muda. Namun, kami melihat ada beberapa aspek yang dapat ditingkatkan, terutama dalam hal keberlanjutan program. Pemuda membutuhkan pendampingan setelah pelatihan, termasuk akses pasar dan permodalan yang lebih luas. Dengan penguatan di tahap pasca-pelatihan, kebijakan ini akan lebih efektif dalam mencetak wirausahawan muda yang benar-benar mandiri dan berdaya saing.
5. Apa harapan lembaga Anda terhadap kebijakan kepemudaan ini dalam mendukung pengembangan wirasaha muda di Bojonegoro?
Harapan kami adalah agar kebijakan kepemudaan ini terus diperkuat, baik dari sisi anggaran, sinergi antar-organisasi perangkat daerah, maupun kemitraan dengan lembaga pelatihan dan dunia usaha. Kami juga berharap adanya sistem monitoring dan evaluasi yang lebih berkelanjutan terhadap para peserta pelatihan, sehingga perkembangan usaha mereka dapat dipantau dan dibantu ketika menghadapi kendala. Selain itu, kami berharap pemerintah lebih banyak memberikan ruang bagi pemuda untuk memasarkan produk mereka melalui event, pameran, maupun platform digital. Dengan dukungan yang berkelanjutan, kami yakin pemuda Bojonegoro bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
B. Input (Masukan)
1. Sumber daya apa saja (instruktur, kurikulum, sarana) yang disiapkan lembaga dalam pelatihan kewirausahaan pemuda?
Untuk pelatihan kewirausahaan pemuda, kami menyiapkan beberapa sumber daya utama. Dari sisi instruktur, kami bekerja sama dengan para praktisi UMKM, konsultan bisnis, serta instruktur bersertifikat dari Balai Latihan Kerja. Kurikulum pelatihan juga kami susun secara terstruktur, mulai dari materi dasar seperti motivasi kewirausahaan, penyusunan rencana bisnis, manajemen keuangan, hingga pemasaran digital. Sementara itu, dari sisi sarana, kami menyediakan ruang pelatihan, peralatan pendukung seperti komputer, bahan praktik, serta akses internet untuk membantu peserta dalam praktik pemasaran online.
2. Bagaimana proses perencanaan kegiatan pelatihan dilakukan? Apakah melibatkan koordinasi dengan dinas terkait?
Perencanaan kegiatan pelatihan kamiawali dengan melakukan identifikasi kebutuhan pemuda di lapangan melalui data dari desa, kecamatan, serta laporan dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga maupun Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Setelah itu, kami menyusun rancangan kegiatan, menentukan jenis pelatihan yang relevan, dan menetapkan target peserta. Proses penyusunan perencanaan selalu kami koordinasikan dengan dinas terkait, terutama untuk penyesuaian

program dengan Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa pelatihan yang kami selenggarakan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah.
3. Dari mana sumber pendanaan kegiatan pelatihan berasal (APBD, bantuan pemerintah, swasta, atau mandiri)?
Pendanaan kegiatan pelatihan ini sebagian besar berasal dari APBD Kabupaten Bojonegoro melalui program kepemudaan dan ketenagakerjaan. Namun, di beberapa kegiatan, kami juga memanfaatkan dukungan kerja sama dari pihak swasta melalui program CSR, khususnya perusahaan yang memiliki fokus pada pemberdayaan ekonomi. Selain itu, ada pula bantuan dari kementerian atau pemerintah pusat dalam bentuk fasilitasi instruktur maupun penyediaan peralatan pelatihan.
4. Bagaimana lembaga menentukan peserta yang berhak mengikuti pelatihan kewirausahaan?
Penentuan peserta dilakukan melalui proses seleksi administrasi dan penilaian minat. Biasanya, peserta mendaftar melalui desa, karang taruna, atau secara langsung ke lembaga. Kami menyeleksi berdasarkan kriteria usia pemuda, domisili Kabupaten Bojonegoro, serta komitmen mengikuti keseluruhan rangkaian pelatihan. Selain itu, kami lebih memprioritaskan pemuda yang sudah memiliki rintisan usaha atau memiliki rencana bisnis yang jelas, agar pelatihan benar-benar memberikan dampak
5. Apakah lembaga memiliki standar atau indikator keberhasilan dalam pelaksanaan pelatihan kepemudaan?
Ya, kami memiliki beberapa indikator keberhasilan. Secara umum, indikatornya meliputi tingkat kehadiran peserta, kelulusan evaluasi materi, serta kemampuan peserta menyusun rencana bisnis pada akhir pelatihan. Selain itu, indikator dampak jangka panjang juga kami pantau, seperti berapa banyak peserta yang memulai usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Kami juga melakukan monitoring pascapelatihan untuk melihat apakah pelatihan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas pemuda di bidang wirausaha.
C. Process (Proses)
1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pelatihan kewirausahaan dilakukan (tahapan, durasi, bentuk kegiatan)?
Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan biasanya kami lakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, ada pendaftaran yang dilakukan bekerja sama dengan dinas terkait. Setelah peserta ditetapkan, kami melakukan pembekalan awal untuk menjelaskan rencana kegiatan, aturan, serta target pelatihan.

2. Metode pelatihan apa yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan wirausaha pemuda?
Praktik mandiri dan praktik berkelompok supaya peserta benar-benar mencoba. Diskusi dan studi kasus, agar mereka bisa memahami masalah usaha yang sering terjadi di lapangan. Pendampingan ringan, misalnya setelah praktik mereka kami beri umpan balik dan arahan perbaikan.
3. Bagaimana bentuk kerja sama antara lembaga Anda dengan pemerintah daerah selama proses pelatihan berlangsung?
Biasanya Dinas yang menentukan sasaran program, menyiapkan pendanaan, dan membantu proses rekrutmen peserta. Kami sebagai lembaga pelaksana bertanggung jawab menyiapkan materi, instruktur, peralatan, dan tempat pelatihan.
4. Apa kendala utama yang dihadapi lembaga dalam melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda?
Kendala yang sering kami hadapi adalah perbedaan kemampuan dasar peserta, sehingga ada yang cepat memahami dan ada yang perlu bimbingan ekstra. Selain itu, keterbatasan peralatan pelatihan juga kadang menjadi masalah, apalagi kalau jumlah peserta cukup banyak. Kendala lainnya adalah keterbatasan waktu, karena pelatihan hanya berlangsung dalam beberapa hari sehingga belum bisa memberikan pendampingan yang lebih intensif. Kadang juga terjadi ketidakhadiran peserta karena berbagai alasan seperti pekerjaan atau kegiatan lain.
5. Bagaimana lembaga melakukan monitoring atau evaluasi selama pelaksanaan pelatihan?
Monitoring kami lakukan dengan mengisi absensi, mencatat perkembangan peserta, serta melakukan observasi langsung selama pelatihan berlangsung. Instruktur juga memberikan laporan harian terkait keterlibatan peserta dan hasil praktik mereka.
D. Product (Produk)
1. Apa hasil yang telah dicapai dari kegiatan pelatihan kewirausahaan yang dilakukan lembaga Anda?
Selama pelatihan ini berjalan, kami melihat hasil yang cukup positif. Peserta tidak hanya memahami teori kewirausahaan, tetapi juga mampu menghasilkan prototype produk, membuat rencana bisnis, serta mempraktikkan teknik pemasaran digital. Beberapa kelompok bahkan berhasil memproduksi barang secara konsisten selama proses pelatihan. Dari sisi capaian, kami juga memantau adanya peningkatan kepercayaan diri peserta dalam memulai usaha.
2. Apakah peserta pelatihan menunjukkan peningkatan kemampuan atau telah memulai usaha setelah mengikuti program?

Banyak peserta yang menunjukkan peningkatan keterampilan, terutama dalam manajemen usaha, branding, dan penggunaan media sosial untuk promosi. Beberapa dari mereka sudah mulai membuka usaha rumahan kecil-kecilan, seperti kuliner, kerajinan tangan, dan jasa desain. Memang tidak semuanya langsung memulai usaha, tapi paling tidak mereka sudah memiliki bekal dan rencana yang lebih matang dibandingkan sebelum pelatihan.
3. Bagaimana respon dan tingkat partisipasi pemuda terhadap kegiatan pelatihan yang dilakukan?
Respons pemuda cukup baik, apalagi jika pelatihan yang kami tawarkan sesuai minat mereka. Kuota pelatihan biasanya cepat terpenuhi, terutama pada tema yang lagi tren seperti digital marketing dan kewirausahaan kreatif. Namun tetap ada tantangan, misalnya beberapa peserta kurang konsisten hadir karena kesibukan bekerja. Tapi secara keseluruhan, tingkat partisipasi pemuda bisa dikatakan cukup tinggi dan antusias.
4. Apakah ada tindak lanjut atau pendampingan bagi peserta setelah pelatihan selesai?
Ya, kami menyediakan pendampingan lanjutan selama beberapa bulan setelah pelatihan. Bentuknya berupa mentoring bisnis, monitoring perkembangan usaha, serta konsultasi teknis jika peserta mengalami kendala. Kami juga membuat grup komunikasi sebagai wadah berbagi informasi peluang usaha dan pemasaran. Walaupun pendampingan masih terbatas sumber daya, kami berusaha memastikan peserta tetap mendapat dukungan setelah pelatihan selesai.
5. Menurut lembaga Anda, apa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelatihan kewirausahaan bagi pemuda di masa mendatang?
Pertama, pelatihan sebaiknya lebih terarah pada kebutuhan pasar dan minat pemuda sehingga materinya benar-benar relevan. Kedua, durasi pelatihan perlu diperpanjang agar peserta lebih siap dari sisi praktik, bukan hanya teori. Ketiga, pendampingan pasca pelatihan harus diperkuat dengan melibatkan mentor profesional atau pelaku UMKM yang sudah berhasil. Selain itu, dukungan akses modal dan fasilitas pemasaran juga penting agar usaha peserta bisa berkembang dengan lebih cepat. Jika aspek-aspek itu bisa ditingkatkan, saya yakin efektivitas program akan semakin baik.

Informan : Pemuda yang menjadi sasaran program

Tanggal wawancara : 30 November 2025

A. Konteks (Konteks)
1. Bagaimana pendapat Anda tentang kondisi dan kebutuhan pemuda di Kabupaten Bojonegoro sebelum adanya program pengembangan kewirausahaan ini?
Kalau menurut saya, sebelum ada program ini banyak pemuda di Bojonegoro yang sebenarnya punya semangat dan kreativitas, tapi bingung mau mulai dari mana. Banyak teman-teman yang ingin buka usaha kecil-kecilan, tapi tidak punya keterampilan, tidak tahu cara mengelola usaha, dan terkendala modal. Kesempatannya juga terbatas, apalagi di beberapa desa. Jadi kebutuhan pembinaan dan pelatihan itu besar sekali. Kebanyakan dari kami butuh arahan yang lebih jelas dan pendampingan yang terus-menerus
2. Apakah menurut Anda program kewirausahaan ini sesuai dengan kebutuhan dan potensi pemuda di daerah Anda?
Menurut saya sangat sesuai, karena program ini memang menyasar hal-hal yang paling kami butuhkan. Pelatihannya tidak hanya teori, tapi juga praktik. Kami diajari cara memulai usaha, membuat perencanaan bisnis, sampai memasarkan lewat media sosial. Program ini juga memanfaatkan potensi lokal, seperti produk pertanian, kuliner, dan kerajinan. Jadi apa yang diajarkan benar-benar bisa diterapkan oleh banyak pemuda di Bojonegoro. Saya merasa program ini cocok dengan kondisi daerah dan minat pemudanya
3. Bagaimana Anda mengetahui adanya program ini, dan apa alasan Anda tertarik untuk mengikutinya?
Saya tahu program ini dari media sosial Dinas terkait dan juga dari perangkat desa yang menginformasikan ke pemuda-pemudi setempat. Awalnya saya hanya ikut sosialisasi, tapi setelah mendapat penjelasan saya mulai tertarik. Alasan utama saya ikut karena saya ingin punya usaha sendiri, dan saya merasa ini kesempatan untuk belajar langsung dari pelatihan yang dibiayai pemerintah. Selain itu, ada juga pendampingan dan peluang bantuan permodalan, jadi saya merasa program ini bisa membantu saya lebih cepat memulai usaha
4. Menurut Anda, sejauh mana kebijakan penyelenggaraan kepemudaan di Bojonegoro mendukung aspirasi dan minat wirausaha pemuda?
Menurut saya kebijakan ini sudah cukup mendukung karena memberikan ruang dan fasilitas bagi pemuda yang ingin mengembangkan usaha. Pemerintah menyediakan pelatihan, mentoring, dan kadang juga menghubungkan peserta dengan pihak lain seperti UMKM atau lembaga keuangan. Kami merasa diperhatikan dan difasilitasi.

Tapi memang masih perlu ditingkatkan terutama soal keberlanjutan program setelah pelatihan. Karena pemuda itu butuh pendampingan jangka panjang, bukan hanya satu kali pelatihan.
5. Apakah program ini menjawab tantangan utama yang dihadapi pemuda, seperti pengangguran atau kurangnya lapangan kerja?
Iya, menurut saya program ini cukup membantu mengatasi masalah itu. Banyak teman-teman yang setelah ikut pelatihan jadi punya usaha kecil, atau minimal punya keterampilan baru sehingga lebih siap masuk dunia kerja. Program ini membuka peluang, terutama bagi kami yang sebelumnya menganggur atau hanya bekerja serabutan. Memang belum bisa mengatasi semua masalah, tetapi setidaknya program ini memberi jalan dan motivasi agar pemuda bisa lebih mandiri dan tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal
B. Input (Masukan)
1. Bagaimana menurut Anda proses seleksi atau perekrutan peserta program ini apakah sudah terbuka dan adil?
Menurut saya proses seleksinya cukup terbuka, karena informasinya diumumkan lewat desa, karang taruna, dan media sosial dinas. Pendaftarannya juga mudah, tinggal mengisi formulir dan menyerahkan beberapa berkas. Tetapi kalau soal adil, saya rasa masih bisa ditingkatkan. Ada beberapa teman yang bilang mereka kurang mendapatkan informasi secara merata. Jadi mungkin penyebaran informasinya perlu lebih luas supaya semua pemuda punya kesempatan yang sama.
2. Bagaimana kualitas dan kesiapan narasumber/pelatih yang memberikan pelatihan kewirausahaan kepada peserta?
Kalau soal narasumber, saya merasa kebanyakan sudah cukup kompeten. Mereka benar-benar paham tentang dunia usaha, terutama yang sudah punya pengalaman sebagai pelaku UMKM. Penjelasannya mudah dipahami dan mereka terbuka untuk konsultasi. Hanya saja, ada beberapa sesi yang menurut saya terlalu teoritis, jadi kadang peserta butuh contoh atau praktik lebih banyak. Tapi secara keseluruhan, narasumbernya cukup siap dan profesional.
3. Apakah fasilitas, sarana, dan bahan pelatihan yang disediakan sudah memadai untuk mendukung kegiatan belajar dan praktik?
Fasilitasnya menurut saya cukup memadai, seperti ruangan pelatihan, LCD, kursi, dan peralatan untuk praktik. Bahan pelatihannya juga diberikan dalam bentuk modul sehingga mudah dipelajari lagi di rumah. Cuma mungkin perlu ditambah peralatan praktik untuk beberapa jenis pelatihan tertentu, karena saat praktik kadang harus bergantian dengan peserta lain. Jadi kalau fasilitas ditingkatkan sedikit lagi, kegiatan belajarnya pasti lebih optimal.

4. Menurut Anda, apakah dukungan dari pemerintah daerah, lembaga kepemudaan, atau pihak lain sudah cukup dalam mendukung pelaksanaan program ini?
Dukungan pemerintah daerah saya rasa sudah lumayan, terutama dari sisi pendanaan dan penyediaan pelatih. Lembaga kepemudaan juga ikut membantu menginformasikan program dan memotivasi pemuda untuk ikut. Tapi menurut saya dukungan pendampingan setelah pelatihan masih kurang. Banyak peserta yang setelah pelatihan bingung mau mulai dari mana. Kalau ada pendampingan lanjutan, misalnya mentoring usaha atau bantuan pemasaran, pasti hasilnya lebih terasa.
5. Sejauh mana latar belakang Anda (pendidikan, pengalaman, motivasi) membantu Anda dalam mengikuti program ini?
Latar belakang pendidikan saya sebenarnya bukan di bidang bisnis, jadi awalnya saya agak kesulitan memahami istilah-istilah kewirausahaan. Tapi pengalaman ikut kegiatan karang taruna dan minat untuk membuka usaha sendiri membuat saya cukup termotivasi. Saya ikut program ini karena ingin belajar dan menambah wawasan. Menurut saya, motivasi pribadi sangat berpengaruh. Walaupun tidak punya pengalaman usaha, kalau kita punya niat untuk belajar, pelatihannya tetap bisa diikuti dengan baik.
C. Process (Proses)
1. Bagaimana proses pelatihan atau pembinaan kewirausahaan dilaksanakan? Apakah berjalan sesuai jadwal dan materi yang dijanjikan?
Selama saya mengikuti pelatihan, prosesnya berjalan cukup teratur. Di awal kami diberi penjelasan tentang jadwal, materi, dan apa saja yang akan dipelajari. Secara umum, kegiatan berjalan sesuai jadwal, meskipun ada beberapa pertemuan yang sedikit mundur karena menyesuaikan kedatangan instruktur. Materi yang diberikan juga sesuai dengan apa yang dijanjikan, seperti cara membuat rencana usaha, pemasaran digital, dan praktik usaha sesuai bidang pelatihan.
2. Apakah metode pelatihan yang digunakan (teori, praktik, pendampingan) efektif bagi Anda?
Metode yang digunakan menurut saya cukup efektif. Teori diberikan seperlunya saja dan langsung diikuti dengan praktik, jadi kami bisa langsung mencoba sendiri. Pendampingan instruktur juga membantu karena kalau ada yang belum paham, kami bisa langsung bertanya.
3. Bagaimana interaksi antara peserta, pelatih, dan penyelenggara selama kegiatan berlangsung?
Interaksinya cukup baik. Para pelatih ramah dan mudah diajak diskusi. Mereka sering memberi contoh langsung dan tidak segan mengoreksi hasil praktik kami

dengan cara yang sopan. Peserta-pesertanya juga saling mendukung, apalagi saat praktik kelompok. Penyelenggara dari dinas maupun lembaga pelatihan juga hadir beberapa kali untuk memantau. Kalau ada kebutuhan atau kendala, biasanya mereka cepat merespons. Jadi suasananya cukup nyaman dan terbuka.
4. Apakah Anda menghadapi kendala selama mengikuti program (misalnya waktu, fasilitas, komunikasi, atau materi)?
Ada beberapa kendala, meskipun tidak terlalu berat. Salah satunya soal waktu pelatihan yang cukup padat, jadi kadang saya agak kewalahan membagi waktu dengan aktivitas lain. Fasilitas pelatihan ada yang harus dipakai bergantian karena jumlahnya terbatas, jadi kadang kami harus menunggu giliran. Untuk komunikasi dan materi sih berjalan baik, hanya saja beberapa materi terasa cepat sekali sehingga tidak semua peserta langsung paham. Tapi secara keseluruhan kendalanya masih bisa diatasi.
5. Bagaimana tingkat partisipasi Anda dan peserta lain dalam setiap kegiatan program?
Saya pribadi berusaha ikut aktif karena merasa pelatihan ini bermanfaat dan sayang kalau dilewatkan. Menurut saya, semangat peserta juga kuat karena mereka memang ingin punya usaha atau meningkatkan keterampilan.
D. Product (Produk)
1. Apa hasil konkret yang Anda peroleh setelah mengikuti program ini (pengetahuan, keterampilan, jaringan, atau usaha yang dijalankan)?
Setelah ikut program ini, saya merasakan banyak perubahan. Dari segi pengetahuan, saya jadi paham cara membuat rencana bisnis dan mengelola keuangan usaha. Keterampilan saya juga meningkat, terutama dalam pemasaran online dan pembuatan konten. Selain itu, saya juga dapat jaringan baru dari sesama peserta dan pelatih, jadi bisa saling bertukar ide. Sekarang saya sedang merintis usaha kecil-kecilan di bidang kuliner rumahan.
2. Apakah program ini membantu Anda dalam memulai atau mengembangkan usaha sendiri?
Iya, sangat membantu. Sebelumnya saya sebenarnya punya keinginan untuk membuka usaha, tapi masih bingung harus mulai dari mana. Setelah ikut pelatihan, saya jadi lebih berani untuk memulai karena sudah punya gambaran langkah-langkahnya. Bahkan, beberapa mentor memberi masukan yang sangat berguna untuk memperbaiki konsep usaha saya.
3. Menurut Anda, apakah perubahan positif terjadi pada diri Anda setelah mengikuti program (motivasi, kemandirian, atau kemampuan berwirausaha)?

Perubahannya terasa sekali. Motivasi saya meningkat, karena selama pelatihan saya melihat banyak teman yang juga sedang berjuang memulai usaha. Itu bikin saya lebih semangat dan percaya diri. Dari sisi kemandirian, saya jadi lebih berinisiatif mencari peluang usaha sendiri. Kemampuan berwirausaha juga jelas bertambah, terutama dalam mengatur waktu, mengambil keputusan, dan memahami risiko usaha
4. Apakah manfaat program ini juga dirasakan oleh masyarakat sekitar atau lingkungan Anda?
Menurut saya iya. Misalnya, usaha kecil yang saya jalankan sekarang bisa membantu menyediakan produk makanan untuk warga sekitar tanpa harus jauh-jauh membeli. Selain itu, ada juga teman satu desa yang setelah ikut program ikut membuka usaha baru, jadi ada peningkatan aktivitas ekonomi kecil-kecilan. Lingkungan jadi lebih hidup karena banyak pemuda mulai berani berkegiatan produktif.
5. Apa saran Anda agar program ini lebih bermanfaat dan berkelanjutan bagi pemuda di Bojonegoro?
Saran saya, program ini sebaiknya sering dilakukan dan jangkauannya diperluas sampai ke desa-desa yang jauh dari kota. Banyak pemuda di desa yang sebenarnya punya potensi, tapi kurang akses informasi. Selain itu, pendampingan setelah pelatihan perlu diperkuat, biar kami tidak bingung ketika menghadapi kendala saat menjalankan usaha. Kalau bisa juga diberikan akses permodalan atau kerja sama dengan UMKM lokal agar usaha kami bisa berkembang.

Informan : Masyarakat Sekitar

Tanggal Wawancara : 30 November 2025

A.Context (Konteks)
1. Bagaimana pandangan Anda terhadap kondisi dan peran pemuda di lingkungan ini sebelum adanya program pengembangan kewirausahaan?
Sebelum ada program ini, pemuda di lingkungan kami kebanyakan tidak punya aktivitas yang jelas. Ada yang bekerja serabutan, ada yang menganggur, dan banyak juga yang sebenarnya punya kemampuan tapi belum tersalurkan. Perannya di masyarakat juga masih kurang terlihat. Mereka sering ikut kegiatan sosial, tapi untuk kegiatan yang menghasilkan atau membantu ekonomi keluarga masih jarang. Jadi bisa dibilang potensi mereka banyak, tapi belum tergarap.
2. Apakah menurut Anda program kepemudaan ini penting untuk dilaksanakan di wilayah Bojonegoro, khususnya dalam bidang kewirausahaan?
Menurut saya sangat penting. Di Bojonegoro ini lapangan kerja tidak selalu banyak, jadi kalau pemuda bisa punya usaha sendiri, itu sangat membantu. Program seperti ini juga membuat pemuda tidak hanya menunggu pekerjaan, tapi belajar menciptakan peluang. Selain itu, dengan adanya pelatihan, pemuda jadi lebih produktif dan tidak hanya berkumpul tanpa kegiatan yang jelas. Kami sebagai masyarakat juga merasa terbantu karena kegiatan ekonomi di lingkungan jadi lebih hidup.
3. Seberapa besar kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi pemuda?
Kebutuhannya besar sekali. Banyak keluarga yang mengharapkan anak-anak mudanya bisa lebih mandiri dan ikut membantu perekonomian rumah tangga. Apalagi di desa atau kecamatan tertentu, kesempatan kerja sangat terbatas, sehingga pelatihan kewirausahaan jadi sangat dibutuhkan. Masyarakat juga ingin melihat pemuda punya keterampilan yang bisa dipakai jangka panjang, bukan hanya ikut pelatihan sesaat.
4. Apakah masyarakat mengetahui tujuan dan manfaat dari program kewirausahaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ini?
Sebagian besar masyarakat sudah mulai tahu, terutama sejak ada sosialisasi dan kegiatan pemuda yang terlihat hasilnya. Kami melihat beberapa anak muda di sini bisa membuat produk, mulai usaha kecil, atau ikut bazar. Tapi memang masih ada warga yang belum terlalu paham detailnya. Mereka hanya melihat dari aktivitas yang dilakukan pemuda. Menurut saya, sosialisasi dari pemerintah sudah ada, tapi bisa lebih ditingkatkan agar semua warga benar-benar mengerti tujuan dan

manfaatnya.
5. Menurut Anda, apakah program ini sesuai dengan potensi dan permasalahan pemuda di daerah Anda?
Iya, program ini cukup sesuai. Pemuda di sini sebenarnya punya minat besar untuk mencoba hal baru, apalagi soal usaha. Masalah mereka biasanya kurang modal, kurang pengetahuan, dan tidak tahu cara memulai. Program ini membantu menjawab masalah itu. Selain itu, potensi daerah seperti pertanian, makanan olahan, dan kerajinan memang bisa dikembangkan oleh pemuda. Jadi menurut saya program ini tepat sasaran, hanya saja perlu pendampingan lebih lanjut agar hasilnya benar-benar terasa dan tidak berhenti di pelatihan saja
B. Input (Masukan)
1. Bagaimana pendapat Anda mengenai dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan kepemudaan dan kewirausahaan di wilayah Anda?
Menurut saya dukungan pemerintah daerah sudah terasa, terutama karena mereka mulai memberi perhatian pada kegiatan pemuda yang berkaitan dengan usaha dan pelatihan kerja. Dulu kegiatan seperti ini jarang ada, tapi sekarang pemerintah lebih sering mengadakan pelatihan atau program untuk pemuda. Walau begitu, menurut saya dukungan ini masih bisa ditingkatkan, terutama dalam hal pendampingan setelah pelatihan dan bantuan modal usaha. Banyak pemuda yang semangat, tapi masih butuh dukungan lanjutan.
2. Apakah sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan program terlihat memadai dan layak?
Secara umum sarana dan prasarananya cukup layak. Tempat pelatihannya nyaman, alat-alatnya juga ada, meskipun mungkin belum terlalu lengkap. Saya lihat ruangan pelatihan cukup luas dan bersih, tapi untuk beberapa jenis pelatihan, peralatannya masih terbatas sehingga peserta harus bergantian. Jadi menurut saya fasilitasnya sudah memadai, namun masih perlu peningkatan kalau pesertanya banyak.
3. Bagaimana menurut Anda tentang kualitas pembina, pelatih, atau penyelenggara yang terlibat dalam kegiatan tersebut?
Dari apa yang saya dengar dan lihat, pembina dan pelatihnya cukup berpengalaman. Mereka terlihat menguasai materi dan bisa membimbing pemuda dengan baik. Banyak peserta yang cerita kalau pelatihnya ramah dan mau membantu menjelaskan hal-hal yang belum dipahami. Tapi ada juga kegiatan yang menurut beberapa pemuda masih terlalu teoritis. Jadi kualitasnya sudah baik, tapi mungkin ke depannya bisa lebih banyak praktik supaya pemuda lebih siap terjun ke lapangan.
4. Apakah masyarakat turut dilibatkan atau diberi informasi mengenai

pelaksanaan program ini?
Kalau soal informasi, sebagian masyarakat tahu karena biasanya diumumkan lewat perangkat desa atau lewat pemuda karang taruna. Tapi tidak semua warga mendapat informasi secara langsung. Mungkin penyampaiannya hanya ke kelompok tertentu saja. Untuk pelibatan masyarakat, saya rasa belum terlalu banyak. Kebanyakan hanya pemudanya yang ikut, sedangkan warga lain hanya mengetahui dari cerita-cerita saja.
5. Sejauh mana peran lembaga atau organisasi masyarakat dalam mendukung kegiatan kepemudaan ini?
Peran lembaga masyarakat seperti karang taruna cukup terlihat, terutama dalam membantu menyosialisasikan program dan mengajak pemuda ikut kegiatan. Organisasi masyarakat juga kadang menyediakan tempat atau membantu koordinasi. Tapi kalau bicara dukungan yang lebih besar, seperti pendampingan usaha atau kolaborasi setelah pelatihan, perannya masih belum maksimal. Menurut saya, kolaborasi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan warga perlu ditingkatkan agar kegiatan ini bisa berdampak lebih luas.
C. Process (Proses)
1. Bagaimana Anda melihat pelaksanaan kegiatan program kewirausahaan di lingkungan Anda apakah berjalan lancar dan terorganisir?
Menurut saya, pelaksanaan program kewirausahaan di lingkungan sini cukup berjalan lancar. Kegiatannya terlihat terorganisir, mulai dari jadwal pelatihan sampai pendampingannya. Panitinya juga terlihat rapi dalam mengatur peserta, jadi tidak terlalu membingungkan warga sekitar. Walaupun ada beberapa hal kecil yang perlu diperbaiki, tapi secara umum sudah tertata.
2. Apakah masyarakat di sekitar turut mendukung atau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut (misalnya menyediakan tempat, dukungan moral, atau kerja sama)?
Iya, masyarakat cukup mendukung. Beberapa warga menyediakan tempat untuk kegiatan, misalnya aula desa atau balai pertemuan. Ada juga yang bantu secara informal, seperti membantu menyiapkan konsumsi atau memberikan dukungan moral bagi peserta yang ikut pelatihan. Kerja samanya lumayan terasa, walaupun tidak semua warga terlibat langsung
3. Bagaimana komunikasi antara panitia pelaksana, peserta program, dan masyarakat selama kegiatan berlangsung?
Menurut saya, komunikasinya cukup baik. Panitia biasanya memberi informasi lewat pengumuman desa atau grup WhatsApp. Peserta program juga sering menyampaikan perkembangan kegiatan ke warga, jadi kami tahu apa saja yang

sedang dilakukan. Hanya saja, terkadang informasi mendadak, jadi beberapa warga kurang siap ketika ada kegiatan tertentu
4. Apakah pelaksanaan program ini mengganggu aktivitas masyarakat sekitar atau justru memberikan manfaat langsung?
Tidak terlalu mengganggu, kok. Kegiatannya biasanya dilakukan di tempat yang memang sudah biasa dipakai untuk acara desa. Kalau ada keramaian, masih dalam batas wajar. Malah beberapa warga merasa terbantu karena ada kegiatan yang membuka peluang usaha, misalnya adanya stand UMKM kecil-kecilan. Jadi secara umum lebih banyak manfaatnya
5. Menurut Anda, apakah pelaksanaan program sudah berjalan transparan dan melibatkan unsur masyarakat secara terbuka?
Kalau soal transparansi, sejauh yang saya lihat cukup terbuka. Panitia biasanya menyampaikan informasi anggaran kegiatan secara garis besar saat sosialisasi awal. Masyarakat juga dipersilakan ikut hadir dalam beberapa kegiatan atau diskusi. Tapi memang masih ada yang berharap supaya keterlibatan warga lebih diperluas, misalnya dalam perencanaan atau evaluasi.
D. Product (Produk)
1. Apakah Anda melihat adanya perubahan pada pemuda di lingkungan ini setelah mengikuti program kewirausahaan tersebut (misalnya lebih produktif, mandiri, atau kreatif)?
Iya, saya melihat ada perubahan yang cukup jelas. Pemuda yang ikut program ini sekarang kelihatan lebih aktif dan produktif. Beberapa yang tadinya sering menganggur sekarang sudah punya kegiatan usaha sendiri. Mereka juga jadi lebih kreatif, apalagi yang belajar promosi online hasilnya terlihat dari produk-produk yang mereka jual
2. Apakah program ini memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, misalnya peningkatan ekonomi lokal atau munculnya usaha baru?
Menurut saya ada dampak positifnya. Sejak beberapa pemuda mulai buka usaha kecil, seperti makanan rumahan atau jasa desain, masyarakat jadi punya lebih banyak pilihan tanpa harus jauh-jauh ke kota. Ekonomi di lingkungan sini juga lebih hidup karena ada perputaran uang dari usaha kecil yang mereka jalankan.
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap hasil kegiatan ini apakah dianggap bermanfaat atau belum terasa dampaknya?
Kebanyakan masyarakat menilai program ini cukup bermanfaat. Kami bisa melihat sendiri hasilnya dari aktivitas pemuda yang lebih terarah. Tapi memang masih ada yang bilang dampaknya belum terlalu besar, karena usaha yang muncul masih kecil-kecilan. Tapi secara umum, masyarakat punya pandangan positif dan

berharap program ini terus dilanjutkan.
4. Apakah ada bentuk tindak lanjut dari peserta program yang memberi kontribusi nyata bagi lingkungan (misalnya membuka usaha, menciptakan lapangan kerja, atau kegiatan sosial)?
Ada beberapa peserta yang setelah pelatihan langsung membuka usaha kecil. Walaupun belum besar, mereka sudah bisa mempekerjakan satu atau dua orang untuk membantu. Selain itu, ada juga yang membuat kegiatan sosial seperti pelatihan kecil-kecilan untuk anak muda lainnya. Jadi kontribusinya sudah mulai terasa, meskipun masih dalam tahap awal.
5. Apa saran Anda agar program pengembangan kewirausahaan bagi pemuda di Bojonegoro dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat?
Saran saya, program ini perlu dilakukan lebih sering dan melibatkan masyarakat juga. Kalau bisa, usaha-usaha pemuda dibantu promosi atau dipamerkan dalam acara tingkat desa atau kecamatan supaya lebih dikenal. Selain itu, pendampingan dan bantuan modal perlu diperkuat, karena banyak pemuda sudah punya ide bagus tapi butuh dukungan supaya usaha mereka bisa berkembang dan memberi manfaat lebih besar bagi lingkungan.

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAS) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Ilmu Administrasi Negara ♦ Ilmu Administrasi Niaga ♦ Ilmu Komunikasi
♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031-5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 29 Oktober 2025

Nomor : 2787/K/FISIP/X/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro
Jl. Pattimura No. 24, Sumbang, Kab. Bojonegoro

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Ananda Cahya Regita (1112200074)	Ds. Bubulan RT.18 RW.05, Kec. Bubulan, Kab. Bojonegoro	087778308260

Guna melakukan pengambilan data di:

"Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro"

Dengan Judul Skripsi: **"Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepemudaan dalam Rangka Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Bojonegoro"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan,

Prof. Dr. V. Rudy Handoko, M.S
NPP 20110.86.0062

Lampiran 4 Lembar Bimbingan Skripsi



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi : Administrasi Publik & Administrasi Negara & Ilmu Komunikasi
Majelis Administrasi Publik & Majelis Ilmu Komunikasi & Majelis Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowangi 45 Surabaya 60119
Telp. 031-5881742, 5931800 pgs. 158 email : hsq@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ananda Cahya Rengta

NIS : 1112200074

Program Studi : Administrasi Negara

Dosen Pembimbing I : Dida Rahmadani, S.AP., M.AP

Dosen Pembimbing II : Dra. Intah Murti, M.Si

Judul Skripsi :

**Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepemudaan
Dalam Rangka Pengembangan Kewirausahaan Di
Kabupaten Bojonegoro**

No	Tanggal	Saran/Pemikiran	Pembimbing	
			Paraf Dosen I	Paraf Dosen II
1	20/10/2025	Peta dilekstopi, landasan teori ditambah tabel pendahuluan.		<i>[Signature]</i>
2	27/10/2025	Perbaiki LBM dengan menambahkan data fokus, untuk pemetaan, penguatan dan keahliannya terkait masalah, perencanaan dan keahliannya.	<i>[Signature]</i>	
3	3/11/2025	Data sekunder yg penting & fokusnya? Mantap buat di proposal Bab II : Kewirausahaan		<i>[Signature]</i>
4	23/11/2025	Bab II : Kewirausahaan + Rangkaiannya Kerangka		<i>[Signature]</i>
5	25/11/2025	Perbaiki bab III, fokus, informan, teknik Analisis data	<i>[Signature]</i>	
6	9/12/2025	Cek metode, informan, teknik analisis data	<i>[Signature]</i>	
	17/12/2025	Bab I : aae II : aae		<i>[Signature]</i>
		Bab III : fokus, buat logika B. fokus data 3 nya 1. mengungkap data, selanjutnya di rangkai ke kesimpulan dan simpulan.		<i>[Signature]</i>

3



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: • Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi
• Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 189 email: fkip@untag-sby.ac.id

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dosen 1	Paraf Dosen 2
24/25 10		Bab III: fokus blm sesuai dg yg schrump (sesuai dg interview) dan de		
24/25 10		Acc Bab 1-3 Persiapan turun lapangan		
27/25 10		Bab III: acc Siap turun lapangan		
24/25 11		Jangan kebanyakan ChatGPT. Gunakan bahasa sendiri penyajian 1. Hasil wawancara data 2. pembahasan teori analisis pembahasan		
1/25 12		Data & Interview guide blm masuk sesuai dg penyajian data		
3/25 12		Revisi pembahasan + kesimpulan + saran		
9/25 12		Bab IV penyajian data & analisis Lampirkan Bab V. Bab I-V = acc		
9/25 12		Acc Bab 1-V Persiapan daftar ujian		

Catatan:

1. Kartu Bimbingan dibuat satu bimbingan
2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Bimbingan dinyatakan telah selesai

Tanggal: _____

Dosen Pembimbing 1

Dida, MAP

Dosen Pembimbing 2

Ingg, ay

Lampiran 5 Halaman Persetujuan**HALAMAN PERSETUJUAN**

NAMA : ANANDA CAHYA REGITA
NBI : 1112200074
PRODI : ADMINISTRASI NEGARA

Surabaya, 9 Desember 2025

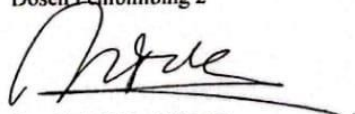
Disetujui Oleh,

Dosen Pembimbing 1



Dida Rahmadanik, S.AP., M. AP
NPP. 20110160733

Dosen Pembimbing 2



Dra. Indah Murti, M. Si
NPP. 20110930301

Lampiran 6 Surat Keterangan Bebas Turnitin



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAS) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
LABORATORIUM OTONOMI DAERAH
 Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN

Nomor: 617/K/LOD/XII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAS) Surabaya

Nama : Moh. Dey Prayogo, S.I.Kom., M.I.Kom
 NPP : 20150220869

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ananda Cahya Regita
 NBI : 1112200074

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%.

Surat Keterangan ini diberikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran Ujian Skripsi"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Desember 2025

Mengetahui
 Kepala Lab. Otonomi Daerah

Dida Rahmadanik, S.AP, M.AP

PIC Uji Plagiasi

Moh. Dey Prayogo, S.I.Kom., M.I.Kom

Lampiran 7 Acceptance Publikasi Jurnal



CAHAYA ILMU BANGSA INSTITUTE

SK KEMENKUMHAM AHU-0018912-AH.01.14

Biro Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Perum Puri Kartika Asri Blok 2 A2 Malang

e-mail : admin@cahayailmubangsa.institute

No : 2025/CIB/LOA
 Lampiran : Link Terbitan dan PDF Terbit
 Subject : Letter of Acceptance

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bersama surat ini, kami menerangkan bahwa artikel dengan keterangan naskah berikut

Judul	:	EVALUASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DI KABUPATEN BOJONEGORO
Author	:	Ananda Cahya Regita, Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP, Dra. Indah Murti, M.Si
Instansi	:	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Korespondensi	:	anandaregita364@gmail.com
Jurnal	:	Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume	:	Volume 10 No 11, 2025

berstatus ACCEPTED untuk dipublish. Keputusan ini dibuat sebagai tanda bahwa naskah yang bersangkutan telah lolos plagiarism checker. Dan LoA ini dibuat sebagai bukti bahwa author telah menyelesaikan APC yang telah ditetapkan oleh pengelola jurnal. LOA Berlaku jika dilengkapi link dan pdf publish. Hubungi kami di admin_jurnal@cahayailmubangsa.institute jika ada pertanyaan lebih lanjut, terima kasih.

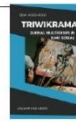
Malang 6 Des 2025



Danang Priambodo, PhD
 Director

Lampiran 8 Artikel Jurnal

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



EVALUASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DI KABUPATEN BOJONEGORO

Ananda Cahya Regita¹, Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP², Dra. Indah Murti, M.Si³

¹²³ Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember, 2025

Revised Desember, 2025

Accepted Desember, 2025

Available Desember, 2025

Anandaregita364@gmail.com

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangas Institute

ABSTRAK

Mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan kepemudaan dalam rangka pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap perangkat daerah terkait, organisasi kepemudaan, serta para pemuda pelaku wirausaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan pada aspek fasilitasi, pelatihan, dan pembinaan, namun efektivitasnya masih belum optimal karena keterbatasan koordinasi antarinstansi, kurangnya kesinambungan program, serta minimnya dukungan sarana dan anggaran. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan, penguatan perencanaan program berbasis kebutuhan pemuda, serta pengembangan ekosistem kewirausahaan pemuda yang bertujuan Perda No. 1 Tahun 2019 dapat tercapai secara maksimal.

Kata Kunci: Kewirausahaan; Kepemudaan; Pengembangan

ABSTRACT

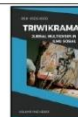
Evaluating the youth implementation policy in the context of developing entrepreneurship in Bojonegoro Regency based on Regional Regulation Number 1 of 2019 concerning Youth Implementation was carried out using a qualitative descriptive approach through data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation studies of related regional apparatus, youth organizations, and young entrepreneurs. The results of the study indicate that the implementation of the policy has been running in the aspects of facilitation, training, and coaching, but its effectiveness is still not optimal due to limited coordination between agencies, lack of program continuity, and minimal support for facilities and budget. This study recommends increasing synergy between stakeholders, strengthening program planning based on youth needs, and developing a more comprehensive youth entrepreneurship ecosystem so that the objectives of Regional Regulation No. 1 of 2019 can be achieved optimally
Keywords: Entrepreneurship; Youth; Development

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, dan sebagian besar penduduknya berada pada usia produktif. Potensi ini tentu menjadi kekuatan besar apabila dapat dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, khususnya dalam bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

^{*}Corresponding author

E-mail addresses: Anandaregita364@gmail.com



Di antara kelompok usia produktif tersebut, pemuda menjadi bagian yang sangat strategis karena memiliki energi, ide-ide segar, dan semangat perubahan. Namun, banyak pemuda Indonesia belum mendapatkan kesempatan yang optimal untuk berkembang secara ekonomi (Ilmu Ekonomi FE-Ull Pengembangan Wirausaha Muda Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015).

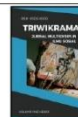
Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro disebabkan oleh kondisi geografis, sarana dan prasarana, jumlah penduduk, rendahnya pendidikan dan rendahnya kualitas kesehatan. Kabupaten Bojonegoro memiliki wilayah hutan yang sangat luas 42% dari luas keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bojonegoro. Masyarakat yang tinggal berdekatan dengan hutan di Bojonegoro tergolong dalam masyarakat miskin, lantaran penduduk sekitar hutan berprofesi sebagai petani, di tambah ketidak pemilikan atas lahan dan keterbatasan sarana dan prasana penunjang hasil pertanian menambah buruk kondisi perekonomian (Diyah & Adawiyah, 2020).

Kondisi sarana dan prasarana sektor pertanian menjadi suatu yang penting untuk di tuntasakan mengingat masyarakat Bojonegoro mayoritas sebagai profesi petani khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan Bojonegoro yang memiliki luas hampir separuh dari luas keseluruhan luas Kabupaten Bojonegoro. Jumlah penduduk juga menjadi tolok ukur untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu wilayah, dilihat dari pendapatan dan jumlah keluarga di dalamnya, serta melihat jumlah sumber daya manusia dalam usia produktif dan usia tidak produktif. Jika dalam dalam usia produktif banyak sumber daya manusia yang menganggur dapat di pastikan kesejahteraan di suatu wilayah pasti rendah. Tingkat pembangunan juga dapat menjadi tolok ukur kesejahteraan wilayah, pembangunan yang baik menandakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik pula (Basia Prodi Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana et al., 2016).

Dalam konteks daerah, Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dari sektor pertanian, industri kreatif, dan sumber daya alam. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan usaha berbasis lokal oleh pemuda. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menggagas berbagai program kepemudaan dan kewirausahaan. Namun demikian, sejauh mana program-program ini efektif dalam mendorong partisipasi pemuda masih perlu dikaji secara mendalam (Kurniawan, n.d.).

Potensi demografi ini merupakan peluang strategis bagi pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan pemuda, khususnya di bidang kewirausahaan. Namun kenyataannya, angka pengangguran dan kemiskinan di kalangan pemuda masih cukup signifikan. Sebagian besar pemuda Bojonegoro masih bergantung pada sektor informal, seperti buruh tani dan pekerja lepas. Hanya sebagian kecil yang terjun ke dunia usaha mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa kewirausahaan belum menjadi pilihan utama dalam mencari penghidupan (Puspitasari et al., 2015).

Rendahnya minat pemuda terhadap kewirausahaan tidak lepas dari keterbatasan akses terhadap pelatihan, modal usaha, jaringan bisnis, dan dukungan kebijakan yang konsisten. Banyak pemuda yang memiliki ide bisnis, namun tidak tahu bagaimana memulainya. Selain itu, tantangan struktural seperti terbatasnya lapangan kerja dan ketimpangan ekonomi antara desa dan kota di Bojonegoro turut memperkuat fenomena urbanisasi. Banyak pemuda memilih merantau ke kota besar seperti Surabaya, Malang, atau bahkan ke luar Jawa. Jika dikelola dengan baik, potensi lokal Bojonegoro seperti hasil pertanian, batik khas Jonegoroan, serta kerajinan kayu dan rotan,



dapat menjadi basis pengembangan wirausaha lokal yang berdaya saing (*Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Pote*, n.d.).

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mencanangkan sejumlah program pemberdayaan pemuda melalui pelatihan wirausaha, pendampingan UMKM, dan fasilitasi bantuan modal. Namun, belum ada kajian mendalam mengenai efektivitas dari program-program tersebut. Evaluasi terhadap kebijakan daerah menjadi penting untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan telah tepat sasaran, efisien dalam penggunaan anggaran, dan berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan pemuda. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk membangun ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan. Kebijakan kepemudaan seharusnya tidak hanya berorientasi pada output seperti jumlah peserta pelatihan, tetapi juga pada outcome dan impact seperti jumlah usaha baru yang bertahan dan berkembang (URGensi PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK MENANGGULANGI PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA, n.d.).

Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor migas (minyak dan gas bumi). Namun, ironisnya, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara merata. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya. Ketimpangan pembangunan dan keterbatasan akses ekonomi, terutama di kalangan pemuda dan masyarakat pedesaan, menjadi salah satu faktor penyumbang tingginya angka kemiskinan tersebut (Pusat et al., 2019).

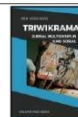
Dalam menghadapi permasalahan kemiskinan, pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya mengandalkan sektor formal, tetapi juga mendorong tumbuhnya sektor informal dan ekonomi kreatif, salah satunya melalui pengembangan kewirausahaan. Kewirausahaan diyakini sebagai salah satu solusi strategis untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap lapangan kerja konvensional yang semakin terbatas. Pemuda sebagai kelompok usia produktif memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak dalam kegiatan wirausaha yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Puspitasari et al., 2015).

Kabupaten Bojonegoro menunjukkan komposisi penduduk yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2024, sekitar 63,62% dari total penduduk—atau sekitar 868,48 ribu jiwa—berada dalam kelompok umur 15-59 tahun. Jika diasumsikan sebagian besar dari kelompok ini merupakan pemuda yang baru memasuki usia kerja atau berada pada awal fase angkatan kerja (usia 15-30 tahun), maka jumlah pemuda potensial untuk didorong dalam kewirausahaan cukup signifikan.

Data rinci dari Sensus Penduduk 2022 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk di rentang usia 15-19 tahun adalah 87.710 jiwa, sedangkan untuk 20-24 tahun mencapai 92.048 jiwa, dan 25-29 tahun sekitar 97.037 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa total pemuda usia kerja (15-29 tahun) dapat ditaksir mencapai sekitar 276.795 jiwa, jumlah yang sangat potensial jika difasilitasi dengan kebijakan kewirausahaan yang tepat.

*Corresponding author

E-mail addresses: Anandaregita364@gmail.com



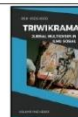
Angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi sumber daya manusia muda yang besar dan siap kerja, namun tanpa intervensi yang tepat, jumlah pemuda ini juga berisiko menjadi beban sosial. Bahkan laporan sebelumnya menyebutkan bahwa pada tahun 2019 jumlah penduduk usia kerja di Bojonegoro telah mencapai 990 ribu orang, dengan peningkatan angkatan kerja baru hingga 61.365 orang selama 2017-2020. Jika jumlah tersebut tidak diimbangi dengan kebijakan yang efektif dalam pengembangan kewirausahaan atau penciptaan lapangan kerja, maka akan berpotensi menimbulkan penumpukan pengangguran—yang, menurut data pada Agustus 2020, mencapai angka 37 ribu. Oleh karena itu, pengembangan kewirausahaan pemuda bukan hanya sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk memanfaatkan potensi demografi ini secara maksimal (109-352-1-PB, n.d.).

Kabupaten Bojonegoro telah secara konsisten menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan pemuda sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Pada tahun 2023, sebuah Sarasehan Kepemudaan diadakan untuk merumuskan strategi pemberdayaan pemuda, dan berhasil melibatkan sekitar 150 peserta dari berbagai organisasi kepemudaan dan komunitas lokal. Kemudian, pada 2024 dihelat program Collab Ranger sebagai bentuk kolaborasi membentuk Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN), yang berhasil menjangkau 713 peserta, terdiri dari siswa, guru BK, dan pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan. Selanjutnya, pada Agustus 2024, Young Entrepreneurs Expo dan Forum Pemuda Pelopor digelar dengan menghadirkan puluhan wirausaha muda dan pelaku ekonomi kreatif di 39 booth, sebagai wahana pengembangan ide dan kreativitas pemuda di bidang kewirausahaan (ppid.bojonegorokab.go.id).

Pemberdayaan kepemudaan merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas generasi muda agar mampu bersaing di dunia kerja. Pada dasarnya, pemuda merupakan kelompok usia yang memiliki potensi besar dalam mempengaruhi kemajuan dan pembangunan suatu daerah, termasuk Kabupaten Bojonegoro. Namun, meskipun jumlah pemuda cukup besar, seringkali mereka menghadapi tantangan dalam memasuki dunia kerja. Beberapa faktor yang menjadi penghambat antara lain kurangnya keterampilan yang relevan, rendahnya pendidikan dan pelatihan, serta ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, pemberdayaan pemuda di Kabupaten Bojonegoro menjadi sangat penting untuk menciptakan tenaga kerja yang siap pakai, memiliki keterampilan yang memadai, dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dunia kerja yang dinamis.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu “Pengembangan Badan Usaha Milik Desa melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” oleh Azhari;Moh. Mustofa;Erika Dwi Meisari;Erika Tri Setia Anggarista (2023), yakni sama-sama menyoroti peran pembangunan kapasitas khususnya sumber daya manusia sebagai kunci dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Keduanya mendasari solusi pengembangan usaha (BUMDes dalam penelitian terdahulu dan kewirausahaan pemuda dalam penelitian Anda) pada peningkatan inovasi, pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman para pelaku, sehingga kebijakan dan upaya yang difokuskan pada penguatan kompetensi lokal menjadi benang merah antar-studi(*Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*, n.d.).



Penelitian terdahulu “Gerakan Ayo Sekolah di Kabupaten Bojonegoro: Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan untuk Menyongsong Bonus Demografi” oleh Sonyaruri Satiti (2019), yaitu sama-sama menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi penting dalam merespon peluang demografis maupun ekonomi lokal. Keduanya menyoroti intervensi pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan kepemudaan dan pendidikan sebagai kunci dalam meningkatkan kapasitas masyarakat lokal: satu melalui kewirausahaan pemuda dan satu lagi melalui pengurangan putus sekolah dan perbaikan pendidikan di Bojonegoro(Satiti, 2019).

Penelitian ini memiliki kesamaan substantif dengan penelitian oleh Ahmad Sholikin, “Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Potensi Lokal di Kabupaten Bojonegoro” (2024), dalam hal sama-sama menitikberatkan pada pemanfaatan potensi lokal sebagai fondasi bagi intervensi publik. Meskipun fokusnya berbeda kewirausahaan pemuda versus pengentasan kemiskinan kedua studi ini menyiratkan bahwa penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kebijakan yang disesuaikan dengan konteks lokal merupakan strategi vital bagi pembangunan daerah yang efektif(Ahmad Sholikin, 2024).

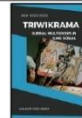
Penelitian terdahulu oleh: Elisa Nur Cahyanti & Listyaningsih tentang peran Karang Taruna di Desa Plesungan dalam mengurangi pengangguran pemuda (2015), memiliki kesamaan pada penekanan pentingnya wadah lokal (kebijakan daerah maupun organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna) untuk meningkatkan kapasitas dan memberdayakan pemuda secara langsung pada level komunitas setempat melalui praktik kewirausahaan dan manajemen usaha, sehingga mendekatkan tujuan pembangunan ekonomi dengan kebutuhan nyata masyarakat desa(Cahyanti, 2015).

Penelitian terdahulu memiliki kesamaan mendasar dengan program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal yang dilaksanakan KKN-TK Universitas Bojonegoro di Desa Betet (2024), yang difokuskan pada peningkatan potensi sektor ekonomi melalui penguatan lembaga masyarakat. Kedua studi ini sama-sama menekankan pentingnya kerangka kelembagaan lokal seperti kebijakan publik di tingkat kabupaten maupun institusi masyarakat desa sebagai pendorong utama dalam mengembangkan kapasitas ekonomi komunitas, khususnya melalui pendekatan kolaboratif yang memberdayakan aktor lokal dalam menciptakan peluang kewirausahaan dan ketahanan ekonomi desa(Anggapratama et al., 2024).

Penelitian terdahulu “Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 1982-2008” oleh Manzila Armylia & Wasino (2021), yang menyoroti intervensi pemerintah melalui pendidikan, ketahanan pangan, dan kesehatan sebagai landasan peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Keduanya berbagi key insight bahwa kebijakan publik yang dirancang untuk memperkuat kapasitas masyarakat entah melalui pendidikan dan layanan dasar, atau melalui dukungan untuk kewirausahaan pemuda dapat menjadi motor utama pembangunan lokal dan transformasi kondisi sosial-ekonomi daerah(*Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 1982-2008*, n.d.).

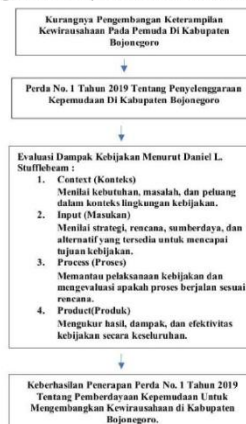
*Corresponding author

E-mail addresses: Anandaregita364@gmail.com



Penelitian oleh Asih Handayani (2018) mengenai “Pengaruh tingkat pendidikan, kesehatan dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro (2002-2015)” sama-sama menggarisbawahi pentingnya faktor-faktor manusiawi seperti pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja sebagai determinan utama dalam memperbaiki kondisi sosial-ekonomi. Dalam penelitian Handayani, terbukti bahwa pendidikan dan kesehatan berkontribusi menurunkan kemiskinan, sedangkan pengangguran malah memperparahnya. Persis seperti itu, skripsi Anda meninjaunya dari sisi kebijakan kepemudaan dan kewirausahaan, yang sesungguhnya juga berakar pada peningkatan kapasitas pemuda melalui pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi sehingga kedua penelitian berbagi visi bahwa penguatan modal manusia dan peluang kerja adalah kunci bagi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan (Tingkat Pendidikan et al., 2002).

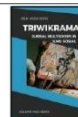
Gambar Kerangka Konseptual Model *Daniel L. Stufflebeam*



2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengevaluasi secara mendalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kepemudaan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Bojonegoro. Pendekatan ini digunakan karena sesuai dengan karakteristik permasalahan yang ingin dikaji, yaitu memahami proses kebijakan, peran para aktor, serta dampak yang ditimbulkan terhadap pengembangan wirausahawan di kalangan pemuda. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman kontekstual mengenai kebijakan dan implementasinya di lapangan.

Jenis dan Sumber Data



Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan sumber data utama yang dilengkapi dan didukung data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Secara umum, penelitian mempunyai dua jenis sumber data, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya atau sumber pertama. Data primer ini merupakan data yang dimaksudkan untuk menjawab fenomena penelitian. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait ataupun melalui pengamatan langsung dari peneliti di lapangan atau tempat penelitian dilakukan. Sumber data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung atau bukan dari sumber pertama. Data sekunder dapat diambil dari dokumen-dokumen, buku literatur, jurnal, internet, dan lain-lain. Data ini digunakan untuk mendukung data primer dalam pelaksanaan proses analisa.

Pengumpulan Data

Secara umum, Pengumpulan data merupakan tahap pertama untuk memperoleh berbagai informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kepemudaan dan program pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Bojonegoro. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro, lembaga pelatihan kepemudaan, dan masyarakat muda pelaku usaha. Tujuannya adalah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap pengembangan kewirausahaan pemuda.

Analisi Data

Adapun prosedur penelitian Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman, yang meliputi empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Stufflebeam, 2000).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Program Desa Devisa

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, Perda ini diterbitkan untuk memberikan arah dan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas, kemandirian, dan peran aktif pemuda, termasuk dalam aspek kewirausahaan. Kebijakan ini menjadi penting karena banyak pemuda Bojonegoro belum memiliki keterampilan dan akses yang memadai untuk memasuki dunia usaha maupun pasar kerja.

Sebelum adanya kebijakan ini, berbagai program kepemudaan di Bojonegoro dinilai tidak terkoordinasi dengan baik dan kurang menyentuh kebutuhan riil pemuda, terutama terkait kesempatan berwirausaha. Beberapa pemuda mengeluhkan minimnya pelatihan yang relevan dan tidak meratanya akses informasi tentang kegiatan pengembangan diri. *"Awalnya kebijakan ini dibuat karena kita melihat banyak anak muda yang punya minat usaha, tapi masih kurang akses pelatihan, pendampingan, dan ruang untuk berkembang. Perda ini ada supaya pembinaan pemuda bisa lebih terarah. Sampai sekarang kebijakannya masih relevan, kebutuhan wirausaha muda pun makin besar. Hanya saja, untuk berjalan lebih maksimal, kami tetap butuh dukungan, anggaran yang memadai dan dulu pelatihan itu tidak terarah, tidak semua pemuda tahu ada kegiatan. Dengan adanya Perda, program jadi lebih jelas dan ada dasar hukumnya,"* (Pejabat Dinas Perinaker Bojonegoro).

*Corresponding author

E-mail addresses: Anandaregita364@gmail.com



Adapun Pengelola program dan pelatihan menjelaskan bagaimana latar belakang beliau dapat menjadi pengelola program ini dan menambahkan bahwa kebijakan ini memberikan kejelasan prosedur dan membuka ruang partisipasi pemuda untuk mengembangkan kapasitas diri melalui kegiatan pelatihan, bootcamp, hingga sosialisasi bisnis. Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan dalam pendataan dan pemerataan akses. *"Awalnya saya sebenarnya tidak kepikiran terlibat langsung, tapi kebetulan saudara saya bekerja di Dinas Perinaker dan pernah cerita soal program ini. Waktu kami ngobrol santai, ternyata apa yang dibutuhkan program ini cocok dengan pengalaman dan minat saya di bidang pendampingan usaha. Dari situ saya ditawarkan untuk ikut membantu, dan setelah diskusi lebih lanjut, ya akhirnya saya masuk dan terlibat sampai sekarang. Menurut saya Perda ini bagus karena memayungi kegiatan pemuda, tapi pelaksanaannya belum semua pemuda terjangkau, terutama di desa yang jauh dari kota,"* (Pengelola program dan pelatihan).

Dari sisi pemuda sebagai sasaran program, sebagian besar peserta pelatihan menyatakan bahwa keberadaan kebijakan ini membantu mereka mendapatkan keterampilan baru dan menyiapkan diri untuk memulai usaha. Namun, beberapa pemuda lain yang belum terjangkau program menilai bahwa informasi pelatihan belum sepenuhnya merata. *"Yang ikut program jelas merasa terbantu, tapi kami yang di desa kadang tidak tahu ada pelatihan, jadi tidak bisa daftar,"* (Pemuda non-peserta).

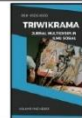
Secara umum, konteks kebijakan ini sangat relevan dengan kebutuhan pemuda Bojonegoro, terutama dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan memperluas kesempatan berwirausaha. Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan masih bergantung pada perbaikan sistem pendataan pemuda, pemerataan akses informasi, serta perluasan jangkauan program ke seluruh wilayah kabupaten.

perencanaan kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda disusun setiap tahun melalui koordinasi lintas bidang, mengacu pada Perda No. 1 Tahun 2019. Namun, pihak dinas mengakui bahwa pendataan pemuda yang menjadi sasaran program belum sepenuhnya optimal. Beberapa desa melaporkan belum memperbarui data pemuda potensial, sehingga daftar calon peserta pelatihan sering tidak akurat. *"Kadang ada pemuda yang sudah bekerja masih tercatat sebagai sasaran pelatihan, tapi pemuda baru yang butuh pelatihan justru belum masuk data,"* (Pejabat Dinas Perinaker).

Dari sisi sarana dan prasarana, pengelola program menjelaskan bahwa fasilitas pelatihan seperti ruang kelas, peralatan praktik, dan perangkat digital sudah tersedia meski kapasitasnya masih terbatas, terutama untuk pelatihan berbasis produksi seperti kuliner, kriya, dan desain. Beberapa desa pinggiran juga mengalami keterbatasan akses transportasi menuju lokasi pelatihan sehingga menyulitkan peserta. Selain itu, instruktur pelatihan berjumlah terbatas dan sering merangkap di beberapa program. *"Alat sudah ada, tapi untuk pelatihan tertentu pesertanya banyak, jadi harus bergantian memakai fasilitas,"* (Pengelola Program).

Dari sisi peserta, pemuda yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka sangat membutuhkan pelatihan, namun informasi mengenai pendaftaran tidak selalu merata sehingga hanya pemuda tertentu yang mengetahui peluang tersebut.

Masyarakat umum mengungkapkan bahwa dukungan terhadap pelatihan sudah cukup baik, tetapi berharap agar pemerintah memperluas cakupan peserta dan menyediakan fasilitas yang lebih memadai. Secara umum, aspek input sudah berjalan sesuai pedoman kebijakan, namun



belum optimal karena lemahnya pendataan pemuda, keterbatasan instruktur, dan sarana pelatihan yang belum merata. mekanisme penyelenggaraan program pelatihan kewirausahaan pemuda di Kabupaten Bojonegoro sudah mengikuti alur baku, mulai dari sosialisasi, seleksi peserta, pelaksanaan pelatihan, hingga monitoring pascapelatihan. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa proses implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Pengelola program menjelaskan bahwa koordinasi antara dinas, perangkat desa, dan peserta tidak selalu berjalan lancar, terutama terkait informasi jadwal pelatihan. *“Kadang jadwal berubah tapi tidak semua peserta mendapat info cepat, akhirnya ada yang datang terlambat atau tidak hadir,”* (Pengelola Program Pelatihan).

dampak dari kebijakan terhadap pemuda serta perkembangan kewirausahaan lokal. Berdasarkan wawancara dengan pejabat dinas, pelatihan kewirausahaan dinilai berhasil meningkatkan keterampilan dan motivasi pemuda dalam memulai usaha, terlihat dari meningkatnya jumlah pemuda yang membuka usaha kecil setelah mengikuti pelatihan. Pengelola program juga menyebutkan bahwa alumni Bootcamp, Workshop, dan Sosialisasi Bisnis menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam hal kemampuan produksi, manajemen keuangan, hingga pemasaran digital. *“Ada beberapa peserta yang setelah pelatihan langsung jualan online dan usahanya berkembang,”* (Pengelola Program).

Pemuda peserta program umumnya merasakan manfaat langsung, seperti meningkatnya pengetahuan tentang pemasaran, kemampuan membuat produk baru, dan kepercayaan diri untuk merintis usaha. Namun, sebagian peserta menyatakan bahwa keterbatasan modal menjadi kendala lanjutan sehingga tidak semua peserta bisa langsung membuka usaha. *“Pelatihannya membantu banget, tapi setelah itu kami butuh modal. Tidak semua bisa langsung jalan,”* (Peserta Inkubasi Bisnis).

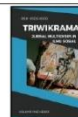
Dari sisi masyarakat, dampak pelatihan terlihat dari bertambahnya unit usaha baru di lingkungan sekitar serta meningkatnya aktivitas ekonomi lokal, terutama di tingkat desa. Mereka menilai bahwa program ini membantu mengurangi pengangguran pemuda dan memberikan efek sosial positif. Namun, masyarakat juga menyoroti bahwa tidak semua peserta dapat mempertahankan usahanya karena kurangnya pendampingan jangka panjang. Secara keseluruhan, output kebijakan menunjukkan kecenderungan positif, tetapi keberlanjutan hasil masih perlu diperkuat melalui dukungan lanjutan dan pemantauan berkala.

Dari sisi pendampingan, pejabat dinas menyebutkan bahwa pendampingan usaha setelah pelatihan memang dirancang dalam program, tetapi belum bisa dilakukan secara rutin karena keterbatasan tenaga pendamping dan banyaknya jumlah peserta. Di sisi lain, pemuda peserta mengaku bahwa proses pelatihan cukup interaktif dan memberikan banyak kesempatan praktik, namun durasi pelatihan dinilai terlalu singkat untuk materi tertentu, terutama terkait pengembangan produk dan pemasaran digital. *“Pelatihannya bagus, tapi waktunya sedikit. Belum sempat praktek banyak, sudah pindah materi lain,”* (Peserta Pelatihan).

Masukan dari masyarakat menunjukkan bahwa beberapa hasil pelatihan belum sepenuhnya terimplementasi karena peserta membutuhkan bimbingan lanjutan. Mereka juga menilai bahwa pelatihan sudah berjalan baik, tetapi keterlibatan pemuda desa terpencil masih

*Corresponding author

E-mail addresses: Anandaregita364@gmail.com



rendah karena kendala akses dan informasi. Secara menyeluruh, proses implementasi cukup kondusif, tetapi belum maksimal karena kendala komunikasi, aksesibilitas, dan lemahnya pendampingan pascapelatihan.

Selain itu, terdapat pula kegiatan Workshop Wirausaha Muda, yang diikuti oleh 89 orang pemuda. Program ini lebih menekankan pada peningkatan wawasan, manajemen dasar usaha, serta pemanfaatan teknologi dalam pengembangan bisnis modern. Sebagai pendukung ekosistem wirausaha lokal, pemerintah juga menyelenggarakan Inkubasi Bisnis UMKM/BUM Desa dengan jumlah peserta yang jauh lebih besar, yaitu 375 orang. Inkubasi ini merupakan bentuk penguatan kapasitas usaha agar lebih siap memasuki pasar, meningkatkan kualitas produksi, dan memperluas jejaring bisnis.

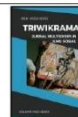
Perkembangan UMKM di Bojonegoro menunjukkan hal yang positif, yang dapat dijadikan indikator bahwa kebijakan dan pelatihan kewirausahaan memberikan dampak yang cukup berarti. Data menunjukkan bahwa jumlah UMKM meningkat dari 78.012 unit (2020) menjadi 80.637 unit (2021), kemudian naik menjadi 86.820 unit (2022), 91.390 unit (2023), dan 91.728 unit pada 2024. Dari total UMKM tahun 2024, terdapat 81.562 unit usaha mikro, 9.181 usaha kecil, dan 985 usaha menengah, menunjukkan bahwa sektor usaha mikro mendominasi aktivitas ekonomi masyarakat Bojonegoro.

Aktor Dalam Program Kebijakan

Evaluasi kebijakan penyelenggaraan kepemudaan di Kabupaten Bojonegoro tidak dapat dilepaskan dari peran strategis pejabat Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro. Para pejabat ini bertindak sebagai perumus teknis, pelaksana, sekaligus pengawas jalannya program kewirausahaan bagi pemuda. Mereka berperan memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan amanat Perda No. 1 Tahun 2019 mengenai pengembangan kapasitas, kemandirian, dan kreativitas pemuda. Selain itu, pejabat dinas juga menjadi pihak yang menyediakan anggaran, menyusun kurikulum pelatihan, serta menjalin koordinasi lintas lembaga agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Aktor lain yang berperan penting adalah pengelola program atau pelaksana pelatihan kewirausahaan, yang biasanya terdiri dari instruktur, pendamping UMKM, atau lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Mereka memainkan peran teknis langsung dalam proses pemberdayaan pemuda, mulai dari penyampaian materi, pendampingan praktik wirausaha, hingga evaluasi hasil pelatihan. Kualitas kompetensi para pengelola program sangat menentukan keberhasilan transfer keterampilan kepada peserta. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas pelatihan sangat dipengaruhi oleh kemampuan instruktur dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan pemuda di Bojonegoro, serta sejauh mana pengelola mampu memberikan pendampingan lanjutan setelah pelatihan berlangsung.

Sementara itu, pemuda sebagai sasaran program merupakan aktor utama yang menentukan keberlanjutan kebijakan. Tingkat partisipasi, motivasi, serta kemampuan mereka mengaplikasikan materi pelatihan menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan program kewirausahaan. Banyak di antara pemuda Bojonegoro yang mengikuti pelatihan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman usaha yang beragam, sehingga respons mereka terhadap program pun berbeda. Apabila para pemuda mampu mengembangkan usaha baru atau memperluas usaha yang sudah ada, maka kebijakan ini dapat dikatakan berjalan efektif. Selain itu, masyarakat sekitar juga termasuk aktor yang terdampak, baik secara langsung maupun tidak



langsung. Kehadiran usaha-usaha baru yang dijalankan pemuda berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, membuka peluang kerja, dan memperkuat jaringan sosial di tingkat desa maupun kecamatan. Dampak sosial dan ekonomi masyarakat ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana kebijakan penyelenggaraan kepemudaan benar-benar membawa perubahan positif.

No.	Aktor	Lembaga	Peran
1.	Pemerintah	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro	Mengevaluasi dan mengkaji kebijakan serta program
2.	Eksternal	Pengelola Program/ Pelatihan	Mengimplementasikan program serta monitoring
3.	Sasaran	Pemuda	Berpartisipasi dalam program
4.	Masyarakat	Masyarakat Sekitar	Mendukung berjalanya program

Sumber : peneliti

PEMBAHASAN

Analisis dalam pembahasan ini menggunakan model evaluasi kebijakan CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan Daniel Stufflebeam.

A. Komponen Context (Konteks)

Context dalam model evaluasi CIPP digunakan untuk memahami sejauh mana kebijakan penyelenggaraan kepemudaan dalam rangka pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Bojonegoro memiliki dasar yang jelas, serta kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini, landasan hukum yang digunakan, seperti Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kepemudaan yang menjadi latar belakang lahirnya kebijakan. Evaluasi terhadap konteks diperlukan untuk mengidentifikasi masalah mendasar yang hendak diselesaikan oleh kebijakan, sekaligus melihat kecocokan antar tujuan kebijakan dan kebutuhan riil pemuda di daerah.

Dalam penelitian di lapangan, ditemukan bahwa penyusunan kebijakan ini berangkat dari kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan kemandirian pemuda, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi seperti tingginya angka pengangguran pemuda dan terbatasnya akses pelatihan kewirausahaan. Informan dari Dinas Perinaker menjelaskan bahwa sebelum kebijakan ini ditetapkan, banyak program kepemudaan yang berjalan tidak terarah dan belum mampu mendorong pemuda berwirausaha secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah melihat potensi besar pemuda di sektor ekonomi kreatif dan UMKM, sehingga kebijakan ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum untuk mendorong pembinaan kewirausahaan secara lebih sistematis.

Berdasarkan wawancara dengan pejabat Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, diketahui bahwa Perda No. 1 Tahun 2019 diterbitkan sebagai respon atas tingginya angka pengangguran pemuda dan minimnya keterlibatan pemuda dalam dunia kewirausahaan. Banyak pemuda setelah lulus SMA/SMK cenderung mencari pekerjaan sebagai buruh industri migas atau merantau, sehingga perlu ada kebijakan yang mendorong kemandirian ekonomi pemuda melalui pelatihan dan pemberdayaan kewirausahaan. Wawancara dengan pengelola program pelatihan menunjukkan bahwa kebutuhan pelatihan kewirausahaan cukup tinggi karena pemuda banyak yang belum memiliki keterampilan teknis. Mereka menilai kebijakan ini relevan, terutama karena

*Corresponding author

E-mail addresses: Anandaregita364@gmail.com



peluang usaha di sektor UMKM, kuliner, pertanian modern, dan industri kreatif di Bojonegoro sangat terbuka.

Dari sisi pemuda, sebagian besar informan menilai bahwa kebijakan ini tepat karena memberikan ruang bagi pemuda untuk belajar keterampilan baru, namun mereka menilai informasi tentang program masih terbatas, sehingga banyak pemuda di desa belum mengetahui adanya pelatihan dari pemerintah. Masyarakat umum, seperti pelaku UMKM dan tokoh desa, menyatakan bahwa program ini dibutuhkan karena dapat mendorong pemuda agar tidak bergantung pada lapangan pekerjaan formal, tetapi menjadi pencipta usaha mandiri. Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara konteks, kebijakan ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pemuda. Namun, relevansinya perlu diperkuat dengan penyebaran informasi yang lebih merata dan peningkatan kebutuhan pelatihan berbasis potensi ekonomi lokal.

Namun, temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, pemahaman masyarakat dan sebagian pemuda terhadap tujuan Perda ini masih rendah. Banyak pemuda yang mengikuti program pelatihan kewirausahaan tetapi tidak mengetahui bahwa program tersebut merupakan bagian dari implementasi Perda No. 1 Tahun 2019. Di sisi lain, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai prioritas program yang seharusnya dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek konteks kebijakan masih perlu ditinjau dalam hal sosialisasi kebutuhan pemuda dengan tujuan kebijakan.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan signifikan. Sebagian besar penelitian sebelumnya menuliskan kebijakan kepemudaan lebih menekankan pada aspek pembinaan karakter, peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi kepemudaan, atau pengembangan minat dan bakat. Hanya sedikit penelitian yang secara spesifik mengkaji kebijakan kepemudaan dalam perspektif pengembangan kewirausahaan. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada pelaksanaan program saja, sedangkan penelitian ini memberikan evaluasi dari sisi konteks, meliputi relevansi kebijakan, dan kebutuhan pemuda yang melatarbelakangi penerapannya dan berhasil atau tidaknya program dalam kebijakan ini.

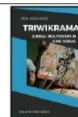
Secara keseluruhan, temuan pada komponen konteks menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat, namun masih memerlukan optimalisasi terutama pada pendataan kebutuhan pemuda dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan. Temuan ini menjadi dasar bagi evaluasi pada model CIPP untuk melihat sejauh mana input, proses, dan produk kebijakan dapat berjalan sesuai dengan konteks yang telah dianalisis.

B. Komponen Input (Masukan)

Komponen input menilai kesiapan sumber daya, perencanaan, dan sarana pendukung kebijakan. Input menjadi aspek penting karena menentukan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan secara efektif sesuai tujuan Perda No. 1 Tahun 2019. Pada komponen ini, evaluasi difokuskan pada ketersediaan sumber daya manusia (SDM), kecukupan anggaran, kejelasan perencanaan program, serta kelayakan sarana dan prasarana pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan kepemudaan dan kewirausahaan pemuda.

Wawancara dengan pejabat Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perencanaan program pelatihan dilaksanakan melalui pendataan pemuda pencari kerja dan pemuda wirausaha pemula. Namun pengelola program mengakui bahwa pendataan belum sepenuhnya akurat karena masih banyak pemuda yang tidak tercatat dalam sistem. Kemudian, jumlah pengelola pelatihan cukup terbatas sehingga beberapa materi harus disampaikan oleh instruktur dari luar daerah.

Selain itu, fasilitas pelatihan, seperti ruang kelas, alat praktik, dan peralatan usaha, dinilai belum memadai untuk beberapa jenis pelatihan, terutama pelatihan berbasis teknologi seperti digital marketing, desain grafis, atau pengolahan produk modern. Pemuda yang diwawancarai menyebutkan bahwa beberapa pelatihan hanya bersifat teori tanpa praktik memadai. Selain itu,



anggaran yang dialokasikan untuk program kewirausahaan pemuda mengalami penurunan setiap tahunnya sehingga beberapa kegiatan harus disesuaikan dengan ketersediaan dana. Meskipun demikian, dinas tetap berupaya menjalin kerja sama dengan pihak ketiga seperti UMK lokal, komunitas wirausaha, dan lembaga pelatihan swasta untuk memperkuat kapasitas program.

Dalam proses perencanaan ditemukan bahwa perencanaan kegiatan kewirausahaan pemuda telah tercantum dalam dokumen perencanaan seperti Renstra dan RKA, namun realisasi di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan perencanaan awal. Beberapa kegiatan pelatihan mengalami perubahan jadwal atau penyesuaian materi karena menyesuaikan kebutuhan peserta atau keterbatasan fasilitator. Selain itu, perencanaan belum sepenuhnya berbasis pada data minat dan potensi kewirausahaan pemuda di setiap kecamatan, sehingga sasaran program terkadang belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka perencanaan sudah tersedia, pemanfaatan data dan analisis kebutuhan masih perlu ditingkatkan. Sarana dan prasarana pendukung kebijakan juga menjadi perhatian penting dalam evaluasi komponen Input. Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa kegiatan kewirausahaan pemuda dilakukan menggunakan fasilitas pemerintah seperti aula kantor dinas yang sebenarnya tidak sepenuhnya dirancang untuk kegiatan pelatihan berbasis praktik. Akses terhadap peralatan usaha, ruang praktik, serta media pembelajaran masih terbatas sehingga beberapa pelatihan hanya dapat memberikan materi dasar tanpa praktik langsung. Sementara itu, masyarakat yang terdampak menyatakan bahwa dukungan modal usaha lanjutan masih minim. Banyak pemuda yang sudah mengikuti pelatihan tetapi kesulitan memulai usaha karena tidak memiliki akses permodalan.

Dengan demikian, aspek input menunjukkan bahwa kebijakan ini sudah memiliki dasar perencanaan yang baik, tetapi belum didukung sepenuhnya oleh fasilitas, pendataan akurat, dan sumber daya instruktur yang memadai. Kelemahan ini berpotensi menghambat tercapainya tujuan pemberdayaan pemuda secara optimal.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan yaitu, penelitian sebelumnya umumnya berfokus pembinaan organisasi kepemudaan atau kegiatan kepeloporan, sehingga analisis pada aspek input lebih menekankan pada peran fasilitator dan pembiayaan kegiatan rutin pemuda. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menilai input pada kebijakan kewirausahaan pemuda, sehingga ruang lingkup pembahasan lebih luas meliputi kompetensi teknis fasilitator kewirausahaan, kecukupan sarana praktik, dan kebutuhan anggaran yang bersifat produktif. Selain itu, penelitian sebelumnya hanya melakukan observasi pada satu program yang fasilitas lengkap, sehingga perbandingannya tidak menunjukkan kurangnya sarana dan fasilitas di program pelatihan yang lainnya.

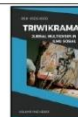
C. Komponen Proses (Proses)

Komponen proses melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan dilakukan di lapangan. Berdasarkan ketentuan Perda No. 1 Tahun 2019. Evaluasi proses mencakup mekanisme pelaksanaan program, koordinasi antar stakeholder, tahapan kegiatan, serta efektivitas implementasi kebijakan dalam menjawab kebutuhan pemuda. Melalui analisis proses, dapat diketahui sejauh mana input yang tersedia dimanfaatkan secara optimal dan bagaimana hambatan pelaksanaan mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan.

Pada wawancara dengan pengelola pelatihan, mekanisme pelaksanaan dimulai dari pendaftaran peserta, seleksi administrasi, pelaksanaan pelatihan, hingga evaluasi akhir. Namun, proses pendaftaran masih banyak bergantung pada informasi daring dan media sosial, sehingga pemuda pedesaan yang kurang aktif di media digital sering tidak mengetahui adanya program tersebut.

*Corresponding author

E-mail addresses: Anandaregita364@gmail.com



Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program kewirausahaan pemuda telah dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan dasar kewirausahaan, pendampingan UMKM pemuda, seminar motivasi, serta fasilitasi lomba inovasi bisnis. Namun, proses pelaksanaan tidak selalu berjalan sesuai perencanaan awal. Beberapa kegiatan mengalami penundaan akibat keterbatasan narasumber atau minimnya peserta dari wilayah tertentu. Dalam pelatihan teknis, materi sering kali lebih menekankan teori dibanding praktik, sehingga peserta merasa belum mendapatkan pengalaman langsung yang cukup untuk memulai usaha. Selain itu, proses pendampingan pascapelatihan masih belum optimal karena belum ada sistem monitoring berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan usaha pemuda.

Proses koordinasi antar instansi, seperti Dinas Perinaker dan pemerintah desa dinilai belum optimal. Hal ini ditegaskan oleh pejabat dinas bahwa masing-masing instansi masih berjalan dengan agenda sendiri, sehingga sinkronisasi program belum terintegrasi. Pemuda peserta pelatihan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan program, beberapa pelatihan tidak tepat waktu dan materi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, pelatihan kadang bersifat sangat dasar sehingga peserta kesulitan mengembangkan keterampilan secara mandiri setelah program selesai.

Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa koordinasi tersebut belum terstruktur dengan baik. Misalnya, beberapa kecamatan merasa belum dilibatkan secara maksimal dalam proses pendataan pemuda atau penentuan lokasi pelatihan. Hal ini menyebabkan distribusi peserta antarwilayah kurang merata dan ada potensi pemuda yang tidak terjangkau program. Sehingga dukungan lanjutan untuk pemuda wirausaha belum berjalan optimal.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, perbedaan utama terletak pada fokus dan karakteristik pelaksanaannya. Sebagian besar penelitian sebelumnya membahas pelaksanaan program kepemudaan dari sisi pengembangan karakter, kepeloporan, atau pemberdayaan organisasi kepemudaan. Dalam konteks tersebut, proses pelaksanaan lebih sederhana karena kegiatan yang dilakukan bersifat ekstrakurikuler atau kepelatihan umum. Berbeda dengan itu, penelitian ini menyoroti pelaksanaan program kewirausahaan pemuda, yang memiliki proses lebih kompleks karena membutuhkan pendampingan, peralatan praktik, keterlibatan mitra eksternal, serta koordinasi antar desa atau kecamatan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan gambaran lebih rinci mengenai tantangan implementasi yang bersifat teknis maupun koordinatif dalam program kewirausahaan.

Secara keseluruhan, evaluasi pada komponen Process menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah diimplementasikan melalui berbagai kegiatan kepemudaan, masih terdapat kendala dalam hal konsistensi pelaksanaan, koordinasi antar kecamatan, serta keberlanjutan program. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperlihatkan bagaimana pelaksanaan kebijakan kewirausahaan pemuda membutuhkan mekanisme yang lebih terstruktur agar mampu menghasilkan dampak yang signifikan. Temuan ini menjadi dasar penting untuk melihat konsistensi hasil pada komponen Product pada bagian selanjutnya.

D. Komponen Product (Produk)

Komponen product dalam model evaluasi CIPP bertujuan untuk menilai hasil atau keluaran dari implementasi kebijakan penyelenggaraan kepemudaan dalam rangka pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Bojonegoro. Evaluasi pada komponen ini menekankan pada pencapaian tujuan kebijakan, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang, serta mengukur sejauh mana program-program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi pemuda, seperti peningkatan pengetahuan kewirausahaan, jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan, hingga terbentuknya usaha baru yang dikelola oleh pemuda.



Berdasarkan wawancara dengan informan dari Dinas Perinaker belum terdapat sistem evaluasi hasil yang terstruktur untuk menilai perkembangan peserta pascapelatihan. Pemantauan dilakukan secara informal dan tidak mencakup keseluruhan peserta, sehingga sulit diukur berapa persen pemuda yang benar-benar mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan. Dari sisi dampak, kebijakan ini memang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas pemuda, namun belum menunjukkan dampak besar terhadap penurunan angka pengangguran pemuda atau peningkatan jumlah UMKM pemuda secara signifikan.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah menghasilkan beberapa capaian positif, seperti adanya peningkatan jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam pelatihan kewirausahaan setiap tahunnya. Para peserta mengaku memperoleh pengetahuan dasar mengenai manajemen usaha, pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan sederhana. Beberapa pemuda yang mengikuti program pendampingan juga telah berhasil memulai usaha kecil seperti bisnis makanan, kerajinan, dan produk kreatif. Namun, jumlah usaha baru yang benar-benar berkelanjutan masih terbatas. Banyak peserta yang mengaku kesulitan mempertahankan usaha karena kurangnya modal lanjutan, pendampingan jangka panjang, dan keterbatasan akses pasar.

Masyarakat menilai bahwa dampak ekonomi program masih terbatas pada sebagian kecil pemuda yang benar-benar memiliki motivasi tinggi. Meskipun demikian, program ini tetap memberikan manfaat positif, terutama meningkatkan kepercayaan diri pemuda untuk memulai usaha dan meningkatkan keterampilan kerja.

Secara keseluruhan, produk kebijakan menunjukkan bahwa program telah memberikan hasil, tetapi dampak jangka panjang masih terbatas. Untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar, diperlukan dukungan lanjutan berupa akses modal, pendampingan, dan penyesuaian pelatihan dengan kebutuhan ekonomi daerah.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menunjukkan perbedaan dalam hal fokus capaian kebijakan. Penelitian sebelumnya banyak menyoroti hasil kegiatan kepemudaan pada aspek pembinaan karakter, penguatan organisasi, atau peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial. Oleh karena itu, hasil yang dianalisis bersifat seperti peningkatan motivasi atau penguatan jaringan antar-organisasi pemuda. Berbeda dengan penelitian ini, peneliti mengkaji hasil kebijakan pada aspek kewirausahaan, sehingga capaian yang dinilai bersifat lebih konkret misalnya jumlah usaha baru, tingkat keberlanjutan usaha, dan peningkatan kompetensi kewirausahaan. Perbedaan ini membuat penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih operasional terhadap evaluasi kebijakan pemuda.

Selain itu, penelitian di daerah lain menunjukkan bahwa hasil kebijakan kewirausahaan pemuda lebih optimal di daerah yang memiliki dukungan sarana memadai. Sementara itu, Kabupaten Bojonegoro masih menghadapi keterbatasan tersebut, sehingga hasil kebijakannya belum mampu mencapai dampak yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah memerlukan pendekatan yang berbeda untuk memaksimalkan hasil program kewirausahaan pemuda.

Secara keseluruhan, komponen Product menunjukkan bahwa kebijakan penyelenggaraan kepemudaan dalam pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Bojonegoro telah menghasilkan beberapa capaian positif, terutama terkait peningkatan kompetensi dan motivasi pemuda. Namun, hasil yang dicapai masih bersifat jangka pendek dan belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pemuda. Perbandingan dengan penelitian terdahulu menegaskan bahwa penelitian ini memberikan dimensi baru dalam evaluasi hasil kebijakan kepemudaan, yaitu dengan menilai seberapa jauh kebijakan mampu menghasilkan dampak nyata pada dunia kewirausahaan pemuda.

*Corresponding author

E-mail addresses: Anandaregita364@gmail.com



4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) dapat disimpulkan bahwa :

1. Aspek Context, kebijakan penyelenggaraan kepemudaan dalam rangka pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Bojonegoro memiliki dasar hukum yang kuat melalui Perda No. 1 Tahun 2019 dan relevan dengan kebutuhan pemuda, terutama dalam menjawab tantangan pengangguran dan potensi ekonomi kreatif lokal. Namun, pemahaman pemuda terhadap substansi kebijakan masih rendah, sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya dipahami oleh penerima manfaat.
2. Aspek Input, pemerintah daerah telah menyediakan sumber daya manusia, perencanaan, dan sebagian sarana pendukung pelaksanaan program. Meski demikian, jumlah SDM khusus dan sarana praktik kewirausahaan masih terbatas, sementara perencanaan program belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil pemuda di berbagai kecamatan. Ketersediaan anggaran juga fluktuatif sehingga beberapa kegiatan harus disesuaikan dengan kondisi pendanaan.
3. Aspek Process, pelaksanaan program telah berjalan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti pelatihan, pendampingan, dan seminar kewirausahaan. Namun, pelaksanaan belum konsisten karena keterbatasan narasumber, koordinasi lintas lembaga yang belum terstruktur, serta pemerataan peserta yang belum optimal. Monitoring pascaprogram juga belum berjalan maksimal sehingga keberlanjutan pendampingan masih lemah.
4. Aspek Product, kebijakan telah menghasilkan peningkatan pengetahuan kewirausahaan pemuda dan memunculkan beberapa usaha baru, namun keberlanjutan usaha tersebut masih rendah. Dampak jangka panjang terhadap pengurangan pengangguran pemuda maupun peningkatan UMKM pemuda belum terlihat signifikan. Secara keseluruhan, kebijakan telah memberikan output positif, namun belum mencapai outcome yang optimal karena keterbatasan input dan proses pelaksanaan yang masih perlu diperbaiki.

Saran

Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi kebijakan dan penyebaran informasi agar pemuda memahami substansi Perda No. 1 Tahun 2019 dan mengetahui peluang yang dapat mereka akses dalam program kewirausahaan. Pemanfaatan media digital, kerja sama dengan sekolah, organisasi pemuda, dan pemerintah kecamatan dapat menjadi strategi efektif dalam memperluas jangkauan sosialisasi.

Kemudian perlu dilakukan penguatan input melalui penambahan SDM kompeten, peningkatan sarana praktik, serta penyusunan perencanaan berbasis data kebutuhan pemuda. Pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan lebih luas dengan sektor swasta, lembaga bisnis, perguruan tinggi, dan komunitas wirasusaha untuk memperkaya materi pelatihan dan menyediakan akses fasilitas pendukung kewirausahaan. Alokasi anggaran juga perlu lebih stabil dan direncanakan secara berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektivitas proses, diperlukan koordinasi lintas lembaga yang lebih terstruktur dan pembentukan sistem monitoring serta pendampingan berkelanjutan. Program pascapelatihan harus dibuat sistematis sehingga perkembangan peserta dapat dipantau dan diberi



dukungan lanjutan seperti akses modal, konsultasi usaha, atau pemasaran digital. Hal ini akan memperkuat dampak kebijakan secara jangka panjang.

Kemudian yang terakhir pada aspek hasil, pemerintah dapat mengembangkan pusat kewirausahaan pemuda sebagai wadah pelatihan dan kolaborasi antar pemuda. Selain itu, perlunya evaluasi rutin agar kebijakan dapat terus diperbaiki sesuai kebutuhan pemuda. Dengan hal tersebut, kebijakan penyelenggaraan kepemudaan diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap munculnya lebih banyak wirausaha muda yang berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyani, R., Zailani, A., Nurdiansyah, F., Azuma, M. I., & Tunas, U. (2025). PEMBERDAYAAN GENERASI MUDA MELALUI PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI BISNIS. In PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Vol. 6, Issue 2).
- Ahmad Sholikin. (2024). Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Potensi Lokal di Kabupaten Bojonegoro. *Journal of Society Bridge*, 2(3), 175-185. <https://doi.org/10.59012/jsb.v2i3.54>
- Anggapratama, R., Munawaroh, S. R., Rahayu, M. R., & Bojonegoro, U. (2024). Peningkatan Potensi Sektor Ekonomi Melalui Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Desa Betet Melalui KKN-T`K Universitas Bojonegoro. In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* (Vol. 4, Issue 3).
- Arifin Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, J., Sosial Gd Cawang Kencana Lt, K. R., Mayjen Sutoyo, J., & Timur, J. (2020). BUDAYA KEMISKINAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA CULTURE OF POVERTY IN POVERTY REDUCTION IN INDONESIA (Vol. 6, Issue 02). *Kesejahteraan Sosial*.
- Basia Prodi Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana, L., Suprihanto, J., & Armawi, A. (2016). STRATEGI PENGEMBANGAN WIRUSAHA PEMUDA DALAM MEWUJUDKAN WIRUSAHAWAN MANDIRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA (Studi pada Koperasi Sumekar di Kampung Sanggrahan Pathuk Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta). In *Jurnal Ketahanan Nasional* (Vol. 22, Issue 1).
- Cahyanti, E. N. (2015). PERAN KARANG TARUNA DALAM MENGURANGI PENGANGGURAN PEMUDA DI DESA PLESUNGAN KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO Listyaningsih (Vol. 02). <http://kataronline.wordpress.com>
- Diandra, D. (n.d.). Program Pengembangan Kewirausahaan Untuk Menciptakan Pelaku Usaha Sosial Yang Kompetitif.
- Diyah, S. ', & Adawiyah, E. (2020). KHIDMAT SOSIAL. In *Journal of Social Work and Social Service* (Vol. 1, Issue 1).
- Hardana IAIN Padangsidempuan Jalan Rizal Nurdin Km, A. T. (2018). PERGURUAN TINGGI. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 6.
- Huberman, A. M. ., & Miles, M. B. . (2002). *The qualitative researcher's companion*. Sage Publications.

*Corresponding author

E-mail addresses: Anandaregita364@gmail.com



Ilmu Ekonomi FE-UII Pengembangan Wirausaha Muda Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta, P. (2015). □ Lak Lak Nazhat El Hasanah (Vol. 4, Issue 2). www.detik.com

kewirausahaan. (n.d.).

Kurniawan, T. (n.d.). "Analyzing the Politics of Law in Indonesian Environmental Policies by using van Meter and van Horn Model." http://www.abc.net.au/4corners/content/2002/timber_mafia/resources/resources_facts.htm,

Larantika, A. A. A. D., Zauhar, S., Makmur, Moc., & Setyowati, E. (2017). Collaboration as a Strategy for Poverty Alleviation. *International Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)*, 1(3), 40. <https://doi.org/10.21744/ijssh.v1i3.51>

Noor Andriana, A., & Fourqoniah, F. (2020). JURNAL PLAKAT Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat PENGEMBANGAN Jiwa Entrepreneur dalam Meningkatkan Jumlah Wirausaha Muda. 2(1).

Pusat, S., Dan, P., Ketenagakerjaan, P., Ketenagakerjaan, K., Jenderal, J., Subroto, G., 51, K., & Selatan, J. (2019). KEWIRUSAHAAN DAN PEMBERDAYAAN PEMUDA DALAM MENGURANGI PENGANGGURAN. In *Jurnal Ketenagakerjaan* (Vol. 14, Issue 1).

Puspitasari, D. C., Muda, W., Desa, M., Partisipasi, D., Desa, P., Dewi, □, & Puspitasari, C. (2015). Wirausaha Muda Membangun Desa: Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa (Vol. 4, Issue 2).

Ratnaya, G., Indriaswuri, R., Widyanthi, D. G. C., Atmaja, I. M. P. D., & Dalem, A. A. G. P. K. P. (2022). CIPP Evaluation Model for Vocational Education: A Critical Review. *Education Quarterly Reviews*, 5(3). <https://doi.org/10.31014/aior.1993.05.03.519>

Satiti, S. (2019). Gerakan Ayo Sekolah di... | Sonyaruri Satiti GERAKAN AYO SEKOLAH DI KABUPATEN BOJONEGORO: PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN UNTUK MENYONGSONG BONUS DEMOGRAFI (THE "AYO SEKOLAH" MOVEMENT IN BOJONEGORO REGENCY: IMPROVING HUMAN RESOURCES THROUGH EDUCATION TO SUPPORT DEMOGRAPHIC BONUS). In *Jurnal Kependudukan Indonesia* | (Vol. 14, Issue Juni).

Stufflebeam, D. L. (2007). CIPP EVALUATION MODEL CHECKLIST [Second Edition] A tool for applying the CIPP Model to assess long-term enterprises Intended for use by evaluators and evaluation clients/stakeholders. www.wmich.edu/evalctr/checklists

TheJournalish: Social and Government. (n.d.). <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>

Tingkat Pendidikan, P., Dan Pengangguran, K., & Handayani, A. (2002). J u n a l E K B I S / V o l . X I X / N o . 1 E d i s i M a r e t 2 0 1 8 | 1024.

URGENSI PENDIDIKAN KEWIRUSAHAAN UNTUK MENANGGULANGI PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA.

Lampiran 9 Lampiran Dokumentasi



Wawancara pejabat Dinas



Kegiatan Sosialisasi Kewirausahaan



Wawancara Pengelola Program



Kegiatan job fair 2019



Wawancara pemuda



Kegiatan pelatihan kewirausahaan



Wawancara Masyarakat



Keg. sosialisasi pembentukan koperasi